

**KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM PERENCANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

(Skripsi)

Oleh
RAHMATUL HIDAYAH
NPM 2216021023



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024

Oleh

RAHMATUL HIDAYAH

Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung merupakan isu kebijakan publik kompleks dan lintas sektor, sehingga penanganannya menuntut keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung tahun 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap aktor utama, yaitu BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, DLH, serta kelurahan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi telah berlangsung dan memiliki beberapa kesesuaian dengan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash, namun belum berkembang menjadi praktik kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan. Pada kondisi awal, hubungan antaraktor telah terbentuk tetapi masih didominasi oleh koordinasi administratif dan belum didukung tingkat kepercayaan yang kuat. Dari sisi kelembagaan, belum terdapat forum kolaborasi yang bersifat tetap untuk mendukung interaksi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Kepemimpinan fasilitatif masih bersifat situasional dan lebih berfokus pada tugas administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menyatukan kepentingan antaraktor. Sementara itu, proses kolaborasi cenderung terjadi pada situasi tertentu dan bersifat reaktif, dengan dialog serta pertukaran informasi yang belum berkembang menjadi mekanisme pembahasan bersama yang rutin. Forum Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) pada tahun 2023 menunjukkan praktik kolaborasi yang cukup partisipatif, namun keberadaannya yang sementara membatasi dampaknya dalam memperkuat kolaborasi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara kuat dan masih menghadapi kendala pada aspek kelembagaan, keberlanjutan forum kolaboratif, dan kualitas interaksi antaraktor.

Kata kunci: kolaborasi multiaktor, *collaborative governance*, perencanaan kebijakan, penanggulangan banjir, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

MULTI-ACTOR COLLABORATION IN FLOOD MITIGATION PROGRAM PLANNING IN BANDAR LAMPUNG CITY 2020-2024

By

RAHMATUL HIDAYAH

The issue of flooding in Bandar Lampung City is a complex and cross-sectoral public policy issue, requiring the involvement of various actors, both governmental and non-governmental. This study aims to analyze the implementation of multi-actor collaboration in flood management program planning in Bandar Lampung City for 2020-2024 and to identify factors that influence the effectiveness of multi-actor collaboration implementation in flood management program planning in Bandar Lampung City for 2020-2024. The research uses a qualitative descriptive approach through in-depth interviews and documentation studies of the main actors, namely BAPPERIDA, the Public Works Agency, BPBD, DLH, as well as the sub-districts and the community. The results of the study show that collaborative practices have taken place and are somewhat in line with Ansell and Gash's collaborative governance framework, but have not yet developed into strong and sustainable collaborative practices. In the initial stages, relationships between actors had been established but were still dominated by administrative coordination and were not yet supported by a strong level of trust. From an institutional perspective, there is still no permanent collaboration forum to support cross-sector interaction and sustainable community participation. Facilitative leadership is still situational and more focused on administrative tasks, so it is not yet fully capable of uniting the interests of various actors. Meanwhile, the collaboration process tends to occur in certain situations and is reactive in nature, with dialogue and information exchange not yet developed into a regular joint discussion mechanism. The Disaster Resilient Village Forum (Katana) in 2023 demonstrated fairly participatory collaboration practices, but its temporary nature limited its impact in strengthening long-term collaboration. Overall, multi-actor collaboration in flood management program planning in Bandar Lampung City has not been strong and still faces obstacles in terms of institutional aspects, the sustainability of collaborative forums, and the quality of interactions between actors.

Keywords: multi-actor collaboration, collaborative governance, policy planning, flood management, Bandar Lampung City.

**KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM PERENCANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

Oleh

RAHMATUL HIDAYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM
PERENCANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

Nama Mahasiswa

: Rahmatul Hidayah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021023

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Dr. Tabah Maryamah, M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si



Penguji Utama

: Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anira Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120060032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Rahmatul Hidayah
NPM 2216021023

Catatan:
Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rahmatul Hidayah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 7 Febuari 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis secara bertahap mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Segala Mider dari kelas I sampai kelas V semester 1, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Kedamaian hingga lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 33 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas diselesaikan di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Sebagai bagian dari proses akademik, pada tahun 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung selama satu semester (enam bulan).

MOTTO HIDUP

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5)

“Strive not to be a success, but rather to be of value”

(Albert Einstein)

“Kalau mau Gagah harus Gigih, kalau mau Pintar harus tahan Banting”

(Maulana Mukhlis)

“Tidak harus sempurna untuk memulai, tetapi harus berani untuk melangkah”

(Rahmatul Hidayah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Alm. A. Dt. Rajo Malano dan Emmilia

Sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Serta Uni dan Abangku tersayang

Terima kasih atas semangat, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Multiaktor dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat partisipasi, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Sebagai wujud rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan bagi kemajuan jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Hertanto, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan, dengan sabar memberikan pembelajaran, saran, dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Yusman Kunang, S.Sos., selaku pembimbing magang sekaligus Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung beserta staf dan jajarannya khususnya bidang sekretariat yang telah memberikan arahan, pengalaman, serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan magang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
9. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin, data, serta bantuan selama proses penelitian.
10. Kedua orang tua tercinta, Alm. A. Dt. Rajo Malano dan Emmilia, yang menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga titik ini. Teruntuk almarhum Ayah, doa dan kenangan tentang nasihat serta perjuangan Ayah senantiasa hidup dalam hati penulis, menjadi penguat di setiap rasa lelah dan ragu. Untuk Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, doa yang selalu mengalir di setiap sujud, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap namun begitu terasa. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi pahala yang terus mengalir dan digantikan dengan keberkahan yang berlipat ganda.
11. Saudara tercinta, Uni Via dan Abang Fikki, yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber semangat di tengah proses panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dorongan, perhatian, doa, serta kepercayaan yang kalian berikan ketika penulis mulai merasa lemah dan hampir menyerah. Kehadiran kalian adalah penguat yang sederhana namun sangat berarti. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita.
12. Kakak ipar tersayang, Kabul Utomo dan Ratih Indrian Putri, yang telah menjadi bagian dari keluarga sekaligus memberikan warna baru dalam

perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebaikan, perhatian, serta dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi pelengkap kebahagiaan dan penguat dalam setiap langkah yang penulis jalani. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap urusan.

13. Ponakan tersayang, Muhammad Azam Al-Qodry, Muhammad Abdullah Abbas, dan Azkiya Putri Yelmi, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan kecil di tengah lelahnya perjalanan ini. Melihat kalian tumbuh memberikan harapan dan doa yang tulus, semoga kalian kelak dapat tumbuh lebih baik, menemukan jalan dan panggilan hidup kalian masing-masing, serta menjadi pribadi yang lebih hebat dari generasi sebelumnya. Semoga langkah kalian selalu dipenuhi kebaikan dan masa depan yang indah. Seperti lirik lagu Nina-Feast, "*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku*".
14. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan support dalam penyelesaian studi ini.
15. Sahabat SMP Dea Rosmala Dewi, teman satu-satunya penulis yang tersisa, dengan semua yang sudah dilewati, terima kasih tetap tinggal dan berteman sampai sekarang.
16. Sahabat MA Tsania Kholiza Nur Putri, Indi Maulida, Indah Septia Lestari yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan memberi warna kehidupan dikala sulitnya perkuliahan.
17. Sahabat Kuliah Irma Indriani, Fanny Dwi Utami, Fina Audina, Siti Rismayanti yang menemani selama proses perkuliahan dari awal maba sampai akhir dengan segala susah senangnya dilalui bersama, terima kasih banyak saya ucapkan.
18. Sahabat pejuang MBKM Chrisyilla Theresia Simanjuntak, Montestia Tabrani, Dwi Mulyanti, Muhammad Ghazy Al-Ghifari yang telah menemani penulis selama pelaksanaan magang, terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalaman terbaik magang di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung.

19. Sahabat dan rekan seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta pengalaman berharga dalam perjalanan akademik penulis.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
21. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tetap bertahan dalam setiap proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena terus berikhtiar, memperbaiki niat, dan berserah diri kepada Allah SWT di tengah rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini. Semoga setiap langkah yang dilalui menjadi bagian dari pembelajaran, penguat iman, dan jalan menuju kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

Rahmatul Hidayah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Konsep Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah	20
2.2. Konsep Multiaktor dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah ..	23
2.3. Teori <i>Collaborative Governance</i>	25
2.3.1. Enam Kriteria <i>Collaborative Governance</i> dalam Konteks Kota Bandar Lampung.....	26
2.3.2. Empat Indikator Inti <i>Collaborative Governance</i>	28
2.3.3. Analisis Relevansi Teori dengan Penelitian	31
2.4. Kerangka Pikir.....	32
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Tipe Penelitian	36
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data	41
3.5. Informan Penelitian	43

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	50
3.8. Teknik Analisis Data.....	52
3.9. Kekurangan Penelitian	55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Gambaran Umum Penelitian	57
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kota Bandar Lampung.....	57
4.1.2. Gambaran Umum Kolaborasi dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Periode 2020-2024	59
4.2. Hasil Penelitian	61
4.2.1. Implementasi Kolaborasi Multiaktor dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	61
4.2.2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif dalam implementasi perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.....	73
4.2.3. Hasil Perencanaan dan Kolaborasi dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	80
4.3. Pembahasan.....	82
4.3.1. Kondisi Awal Kolaborasi dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.....	86
4.3.2. Desain Kelembagaan Kolaborasi dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	91
4.3.3. Kepemimpinan Fasilitatif dalam Proses Kolaborasi Perencanaan Program Penanggulangan Banjir Tahun 2020-	

2024.....	96
4.3.4. Proses Kolaborasi Multiaktor dalam Perencanaan Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.....	101
4.3.5. Keterkaitan Hasil Perencanaan, Kolaborasi, dan Output Kolaborasi dalam Perencanaan Program Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	106
4.4. Implikasi Penelitian terhadap Perencanaan Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung	107
V. SIMPULAN DAN SARAN	111
5.1. Simpulan.....	111
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Terdampak Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	2
2. Informan Penelitian.....	45
3. Ringkasan Temuan Wawancara Per Informan	62
4. Perbandingan Alur Pelaporan dan Penanganan Banjir (Kota Bandar Lampung Periode 2020-2022, 2023, dan 2024)	64
5. Hasil Perencanaan, Hasil Kolaborasi, dan Output Kolaborasi	80
6. Matriks Analisis Teori <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash dengan Temuan Lapangan (Perencanaan Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung Periode 2020-2024).....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Sistem Jaringan Drainase Kota Bandar Lampung	3
2. Model Tata Kelola Kolaboratif.....	30
3. Kerangka Pikir.....	34
4. Wawancara dengan Informan I-OPD1 (BAPPERIDA).....	120
5. Wawancara dengan Informan I-OPD2 (Dinas PU)	120
6. Wawancara dengan Informan I-OPD3 (BPBD)	121
7. Wawancara dengan Informan I-OPD4 (DLH).....	121
8. Wawancara dengan Informan Kelurahan Bumi Waras (I-KEL)	122
9. Wawancara dengan Informan Perwakilan Masyarakat (Kelurahan Bumi Waras) (I-MAS).....	122
10. Forum Katana 2023 (Kelurahan Bumi Waras).....	123
11. BNPB <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan Tim Wilayah (Kelurahan Bumi Waras).....	123
12. Peta Kelurahan Bumi Waras dan Titik Rawan Bencana.....	124
13. Peta Ajuan Rambu Jalur Evakuasi Kelurahan Bumi Waras	124

DAFTAR SINGKATAN

BAPPERIDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Katana	: Kelurahan Tangguh Bencana
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PU	: Pekerjaan Umum
RAPB	: Rencana Aksi Penanganan Banjir
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPBD	: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
SDA	: Sumber Daya Air
SIG	: Sistem Informasi Geografis
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banjir telah lama menjadi salah satu permasalahan utama di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam yang terjadi akibat curah hujan tinggi, tetapi sebagai persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekologis, sosial, dan tata kelola perkotaan (Sigit & Koyama, 2023). Banjir kini diakui sebagai masalah struktural yang berakar pada lemahnya pengelolaan ruang, alih fungsi lahan, serta ketidakmampuan sistem drainase dalam menyalurkan air hujan secara optimal. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung (2025:2-33), penyebab utama banjir meliputi tersumbatnya aliran sungai, minimnya ruang terbuka hijau, dan infrastruktur drainase yang tidak memadai. Kondisi ini berimplikasi pada terganggunya aktivitas ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di perkotaan.

Fenomena serupa juga terjadi di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang, di mana kerugian ekonomi akibat banjir mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Penelitian Pratomo (2008) menunjukkan bahwa risiko banjir meningkat akibat kombinasi faktor hidrologi seperti curah hujan ekstrem dan debit sungai tinggi serta faktor spasial seperti topografi rendah dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali. Dengan demikian, banjir dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor alam dan kelemahan tata kelola perkotaan.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi di Indonesia bagian barat, terutama karena

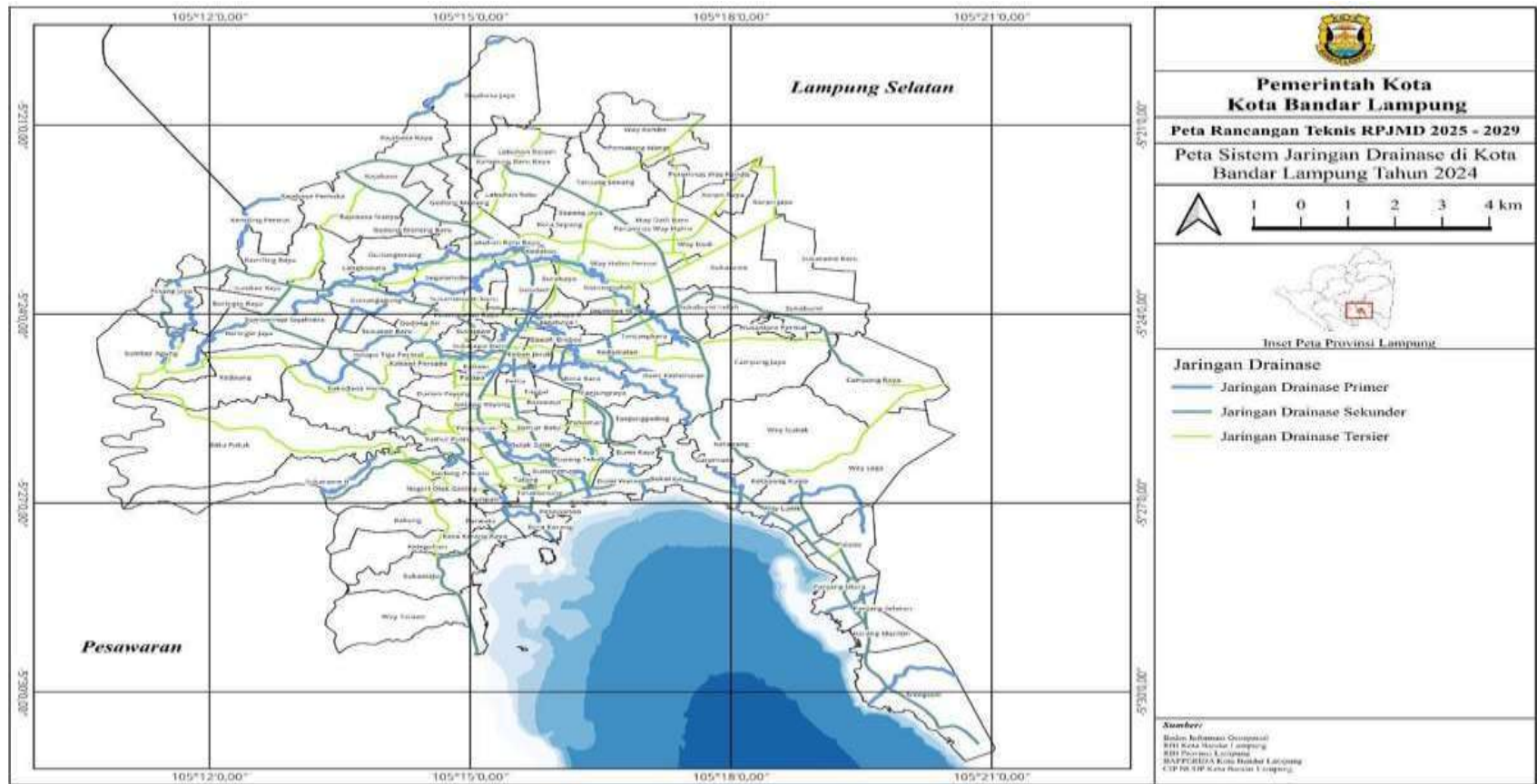
kondisi geografis yang rendah dan banyak dilintasi sungai kecil yang rawan meluap saat curah hujan tinggi. Data dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 35 titik banjir yang tersebar di 25 wilayah dan 14 kecamatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, 2025).

Tabel 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Terdampak Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah Titik Banjir	Kelurahan Terdampak	Kecamatan Terdampak
2020	35	25	14
2021	22	17	9
2022	23	22	14
2023	12	12	8
2024	120	52	16

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung, 2025-2029

Berdasarkan data tersebut, kondisi banjir di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, titik banjir melonjak drastis hingga mencapai 120 titik, berdampak pada 52 kelurahan di 16 kecamatan (BPBD Kota Bandar Lampung, 2025). Peningkatan jumlah titik banjir yang begitu signifikan dalam kurun waktu empat tahun ini menegaskan bahwa permasalahan banjir di Bandar Lampung semakin serius dan meluas, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat serta memunculkan risiko kesehatan yang tinggi. Hal ini menandakan perlunya upaya penanganan yang lebih terencana, baik dari sisi pengelolaan ruang kota, penguatan sistem drainase, maupun pelibatan masyarakat dalam mitigasi bencana. Data tersebut memperlihatkan urgensi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi penanggulangan banjir yang menyeluruh, terkoordinasi, dan berbasis pada pendekatan multi-aktor agar dampak banjir dapat diminimalisir secara efektif.



Gambar 1. Peta Sistem Jaringan Drainase Kota Bandar Lampung.

Sumber: CIP NUDP, 2024

Peta saluran drainase di atas menunjukkan bagaimana jaringan saluran air di Kota Bandar Lampung tersebar dan terhubung antara wilayah satu dan lainnya. Dalam peta terlihat tiga jenis saluran utama, yakni saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran primer merupakan jalur utama penyaluran air menuju laut, sedangkan saluran sekunder berperan sebagai penghubung antar-kawasan, dan saluran tersier biasanya melayani lingkungan permukiman serta perumahan warga. Jika dilihat secara kasat mata, bagian tengah dan selatan kota memiliki jaringan drainase yang lebih padat, namun persoalan utama tetap muncul karena masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan atau saluran yang ada tidak terhubung secara optimal.

Kondisi ini memperjelas masalah kapasitas saluran drainase yang sering kali menjadi penyebab genangan dan banjir ketika hujan turun deras di sejumlah titik kota. Keterbatasan saluran juga berpengaruh pada lancarnya aliran air dari permukiman maupun jalan ke saluran utama. Data dari RPJMD (2025:2-82) mencatat bahwa panjang saluran drainase yang berfungsi hanya sekitar 117,551 kilometer, yang mengindikasikan bahwa kapasitas drainase yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengaliran air hujan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan air permukaan tidak tersalurkan dengan baik dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir. Meskipun demikian, permasalahan banjir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis infrastruktur semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek perencanaan, koordinasi antar instansi, serta pengelolaan tata ruang perkotaan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Persoalan infrastruktur drainase yang tidak memadai sering disebut sebagai penyebab utama banjir, namun aspek kelembagaan dan tata kelola memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan efektivitas penanggulangan banjir secara keseluruhan (Andino, 2025). Di tingkat pemerintahan daerah, perencanaan serta pelaksanaan program penanggulangan banjir menjadi tanggung jawab utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), BPBD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa OPD-OPD ini cenderung

bekerja secara sektoral, tanpa koordinasi yang kuat dan sistem informasi yang terintegrasi. Akibatnya, program perencanaan banjir sering kali bersifat secara terpisah dan tidak saling terkoordinasi, sehingga kurang selaras dengan strategi pengelolaan banjir yang lebih luas, sebagaimana diungkapkan dalam studi Sihaloho (2022) yang menganalisis *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Medan, dimana kurangnya kolaborasi antar OPD menyebabkan inefisiensi implementasi program hingga 30-50% akibat ketidakselarasan kebijakan.

Upaya penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana pada tingkat lokal telah diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, serta koordinasi antara pemerintah dan warga dalam menghadapi potensi bencana. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pengembangan kelembagaan berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dalam konteks tersebut, salah satu inisiatif yang sempat diwujudkan adalah pembentukan Forum Katana yang diinisiasi oleh BNPB bekerja sama dengan BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Forum ini bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk banjir, di tingkat kelurahan. Kehadiran Forum Katana pada tahap awal mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi lapangan dari pihak BAPPERIDA, forum tersebut belum berjalan secara berkelanjutan dan belum terintegrasi dengan mekanisme perencanaan lintas perangkat daerah, sehingga kontribusinya terhadap kebijakan penanggulangan banjir masih terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya awal untuk membangun kolaborasi multiaktor, implementasinya masih belum dilakukan secara konsisten dan belum memiliki mekanisme yang jelas dalam kelembagaan. RPJMD Kota Bandar Lampung (2025:2 - 41) menegaskan

bahwa pelaksanaan program penanggulangan banjir sering kali belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan tata ruang maupun pengelolaan sumber daya air di wilayah sekitar. Akibatnya, terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan proyek seperti pembangunan drainase yang tidak terhubung dengan saluran induk di kawasan lain. Ketidakterpaduan antarprogram ini berdampak pada lambannya penurunan risiko genangan di wilayah perkotaan.

Permasalahan tata kelola ini memperlihatkan perlunya pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan koordinasi lintas aktor. Model ini menekankan pentingnya kerja sama antara instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks Bandar Lampung, kolaborasi semacam ini seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan banjir agar lebih berkelanjutan dan partisipatif. Forum Katana yang pernah terbentuk seharusnya dapat menjadi contoh forum kolaboratif yang diperkuat, bukan sekadar kegiatan temporer yang berhenti tanpa tindak lanjut kebijakan.

Namun, kenyataannya sinergi antar-OPD di Bandar Lampung masih sangat terbatas. Mekanisme koordinasi seringkali bersifat administratif seperti pembahasan dokumen perencanaan, tanpa adanya integrasi data dan program yang nyata. Padahal, keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada komunikasi intensif, keterbukaan dalam berbagi informasi, serta komitmen bersama untuk merumuskan strategi yang komprehensif (Latifah dkk., 2024). Ketiadaan sinergi yang kuat ini membuat upaya penanggulangan banjir berjalan lambat dan kurang efektif. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam penanggulangan bencana secara terpadu. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) juga menegaskan perlunya sinergi antar-OPD dan instansi terkait dalam menghadapi bencana, termasuk banjir, guna mempercepat proses mitigasi dan respons bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian, permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya bersumber dari kekurangan infrastruktur, tetapi juga dari lemahnya kolaborasi antaraktor kebijakan. Forum Katana yang sempat hadir sebagai ruang kolaboratif di tingkat lokal justru menegaskan bahwa upaya kolaborasi masih terputus antara masyarakat dan lembaga perencana kota. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana kolaborasi multiaktor antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung berlangsung selama periode 2020-2024, serta sejauh mana sinergi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas perencanaan program penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

Selain lemahnya koordinasi kelembagaan, hambatan lain dalam membangun kolaborasi antar-OPD adalah keterbatasan data yang bisa diakses bersama. Hingga kini, belum tersedia sistem informasi terpadu yang mampu menggabungkan berbagai data penting terkait banjir, mulai dari curah hujan, kapasitas saluran drainase, hingga peta daerah rawan genangan. Akibatnya, setiap OPD masih cenderung mengandalkan data internal masing-masing atau meminta secara manual kepada instansi lain, yang tentu membutuhkan waktu lama dan menimbulkan inefisiensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data dalam proses perencanaan masih menghadapi keterbatasan. Dalam praktik perencanaan pembangunan, ketersediaan data yang lengkap dan terkini menjadi faktor penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terarah.

Temuan serupa dikemukakan oleh Parameswari (2024) yang menemukan bahwa keterbatasan data *real-time* dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi sistem peringatan dini banjir di Jakarta. Temuan ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal selama data dan sistem informasi masih tersebar di berbagai instansi tanpa adanya integrasi yang kuat. Ketiadaan sistem terpadu membuat kebijakan yang dirumuskan rentan parsial dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Masalah banjir di Kota Bandar Lampung juga semakin kompleks akibat perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat. Pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan pusat perdagangan, serta perluasan jaringan jalan sering kali tidak diimbangi dengan pembangunan drainase dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai. Berdasarkan data RPJMD (2025:2-16), luas RTH Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 hanya mencapai 4,37% dari total kebutuhan ideal 20% sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Minimnya RTH menyebabkan berkurangnya area resapan air dan meningkatnya limpasan permukaan yang berkontribusi terhadap banjir.

Dalam konteks ini, peran OPD yang membidangi tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur menjadi sangat strategis. Namun, tanpa adanya sinergi lintas sektor, kebijakan pembangunan justru berpotensi menciptakan masalah baru. Misalnya, proyek pembangunan jalan tanpa koordinasi dengan Dinas PU dan DLH dapat mengurangi daya serap tanah atau menutup saluran drainase yang sudah ada. Oleh karena itu, kolaborasi antar-OPD menjadi kunci untuk memastikan pembangunan kota berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan adaptasi terhadap risiko banjir (Latifah dkk., 2024).

Hasil perencanaan dan kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD Tahun 2020-2024 dan RKPD tahunan. Namun, dokumen tersebut tidak seluruhnya dapat diakses secara umum, sehingga informasi terkait capaian program tidak diperoleh secara lengkap. Selain itu, belum tersedia sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data antar OPD, sehingga data masih tersebar dan bersifat sektoral. Di tingkat kelurahan, Forum Katana juga telah menghasilkan dokumen perencanaan, seperti peta jalur evakuasi dan wilayah rawan banjir. Akan tetapi, karena pelaksanaannya tidak berkelanjutan sejak tahun 2023, dokumen tersebut tidak lagi dapat diakses secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan integrasi data menyebabkan hasil perencanaan dan kolaborasi sulit ditelusuri dan dievaluasi secara menyeluruh (wawancara dengan OPD, 2025).

Selain itu, kegagalan menghubungkan forum semacam Katana dengan perencanaan lintas sektor memperlihatkan lemahnya sistem koordinasi vertikal dan horizontal dalam pemerintahan daerah. Masyarakat melalui forum tersebut telah memiliki kapasitas dan inisiatif mitigasi, namun tidak didukung oleh mekanisme birokratis yang mampu menyerap aspirasi mereka ke dalam kebijakan formal. Akibatnya, kolaborasi yang seharusnya bersifat *multi-level governance* menjadi tidak terhubung dengan baik antara inisiatif masyarakat dan sistem perencanaan pemerintah.

Selain aspek teknis dan tata ruang, persoalan banjir juga berkaitan dengan horizon perencanaan jangka panjang. Sering kali, perencanaan penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung hanya disusun dalam kerangka tahunan yang mengikuti siklus anggaran. Padahal, penanganan banjir membutuhkan strategi jangka panjang dengan visi yang jelas dan konsisten. Dalam konteks inilah, peran BAPPERIDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjadi sentral. Namun, jika BAPPERIDA tidak mampu menyatukan visi dan program OPD lain, maka strategi jangka panjang hanya akan menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang nyata.

Hambatan berikutnya terdapat pada pola komunikasi antarinstansi yang masih sangat formal dan mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Pertemuan koordinasi biasanya hanya dilakukan pada tahap penyusunan awal dokumen perencanaan atau saat terjadi bencana besar, sementara komunikasi rutin untuk membahas perkembangan program atau permasalahan di lapangan masih jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan masing-masing OPD cenderung menjalankan programnya berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki tanpa mengetahui secara menyeluruh keterkaitan dengan program instansi lainnya. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Emerson et al. (2012) keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka, adanya rasa saling percaya antaraktor, serta pertukaran informasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa adanya ketiga unsur tersebut, kerja sama antarinstansi dalam penanganan permasalahan publik akan sulit berjalan secara efektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut mulai dari keterbatasan data, lemahnya sinergi perencanaan, hingga pola komunikasi yang masih bersifat administratif dan berjenjang, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga kelembagaan. Dalam konteks ini, keberadaan Forum Katana justru menjadi indikator bahwa bentuk-bentuk kolaborasi yang bersifat partisipatif belum diikuti dengan koordinasi kelembagaan yang kuat. Tanpa adanya mekanisme yang menghubungkan forum masyarakat dengan perencanaan lintas-OPD, kolaborasi tersebut tidak akan berkembang menjadi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antar- OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir dapat dibangun secara lebih efektif berdasarkan prinsip *collaborative governance*.

Dalam literatur tata kelola pemerintahan, konsep kolaborasi antarinstansi dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan konsep ini sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana lembaga pemerintah bekerja bersama aktor non-pemerintah melalui proses deliberatif yang formal untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi dalam menghadapi masalah publik yang bersifat kompleks dan lintas sektor.

Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung jelas memenuhi karakteristik tersebut, karena penyelesaiannya melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah kota, lembaga teknis, hingga masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* antar-OPD menjadi relevan untuk dikaji guna memahami dinamika kolaborasi dalam perencanaan penanggulangan banjir.

Berbagai penelitian mengenai penanganan banjir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan pola

koordinasi dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan. Rulinawaty et al. (2022) melalui kajiannya di wilayah Bandung Raya menemukan bahwa upaya pengelolaan banjir membutuhkan mekanisme kolaborasi yang jelas antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan komunitas setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan kewenangan antarinstansi menjadi salah satu penyebab tidak terbangunnya kesepahaman dalam perencanaan program.

Berbagai penelitian mengenai penanganan banjir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan pola koordinasi dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan. Rulinawaty *et al.* (2022) melalui kajiannya di wilayah Bandung Raya menemukan bahwa upaya pengelolaan banjir membutuhkan mekanisme kolaborasi yang jelas antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan komunitas setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan kewenangan antarinstansi menjadi salah satu penyebab tidak terbangunnya kesepahaman dalam perencanaan program.

Temuan senada ditunjukkan oleh Widiyarta (2024) di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki skema penanganan banjir, kerja sama antarlembaga belum berjalan optimal karena rendahnya koordinasi dan tidak adanya standar operasional yang disepakati bersama. Kondisi ini menyebabkan proses mitigasi lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Penelitian lain oleh Atmojo dkk. (2025) di Jakarta Timur menggarisbawahi tantangan kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Sungai Ciliwung. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pelibatan aktor non-pemerintah masih bersifat terbatas, sementara koordinasi antarinstansi pemerintah belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, beberapa program penanggulangan banjir berjalan tumpang-tindih.

Selain itu, Austin dkk. (2025) dalam penelitiannya di Kabupaten Lahat menjelaskan bahwa risiko banjir hanya dapat dikelola secara efektif apabila terdapat pembagian peran yang jelas antaraktor yang terlibat. Mereka menemukan bahwa struktur kelembagaan yang tidak seragam di tingkat kabupaten dan kecamatan menjadi hambatan bagi pelaksanaan model kolaboratif yang dirancang pemerintah daerah.

Wahyudi dkk. (2024) yang mengkaji penanggulangan banjir di Kota Cimahi juga menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan. Menurut mereka, koordinasi antar-OPD masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi kerja sama substantif yang memungkinkan penyusunan program bersama. Hal ini berdampak pada lambatnya respons pemerintah dalam menangani banjir musiman di wilayah tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan banjir di Indonesia membutuhkan kolaborasi multiaktor yang lebih terstruktur dan berbasis peran lintas aktor. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana *collaborative governance* antar-OPD berlangsung dalam proses perencanaan program penanggulangan banjir di tingkat kota, terutama dengan menggunakan kerangka teoritis (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian tersebut melalui analisis empiris terhadap dinamika kolaborasi antar-OPD di Kota Bandar Lampung, yang mencakup bentuk koordinasi, peran masing-masing aktor, kendala kelembagaan, serta peluang penguatan kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir tahun 2020-2024.

Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai banjir di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek teknis, seperti kondisi infrastruktur drainase, analisis daerah rawan banjir, atau dampak perubahan tata guna lahan terhadap hidrologi kawasan. Kajian yang secara khusus membahas aspek kelembagaan, terutama koordinasi antar-OPD dalam merancang program penanggulangan banjir, masih sangat terbatas. Padahal, aspek kelembagaan

merupakan faktor kunci yang menentukan apakah program teknis yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif atau tidak (Latifah dkk., 2024). Dengan demikian, permasalahan banjir tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis, tetapi juga merupakan persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang membutuhkan sinergi antar instansi pemerintah daerah.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Dengan mengkaji kolaborasi antar-OPD dalam proses perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori *collaborative governance* di tingkat pemerintahan daerah. Fokus penelitian diarahkan sepenuhnya pada aktor-aktor birokrasi internal pemerintah daerah, yaitu DLH, Dinas PU, BPBD, serta BAPPERIDA. Pemusatan perhatian pada OPD dipilih karena lembaga-lembaga tersebut merupakan pemegang kewenangan utama dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program. Dengan memahami bagaimana dinamika kolaborasi antar-OPD berlangsung, penelitian ini berupaya menemukan pola kelembagaan yang lebih efektif untuk mengatasi persoalan banjir yang semakin kompleks dan berulang setiap tahun.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan, pemerintah Kota Bandar Lampung sejatinya telah memiliki sejumlah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat program penanggulangan banjir, seperti RPJMD dan RPBD. Namun, dalam praktiknya, dokumen-dokumen tersebut belum sepenuhnya menjadi pedoman terpadu yang mengikat seluruh OPD. Setiap instansi masih memiliki pemahaman dan fokus program yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga implementasi di lapangan cenderung berjalan sesuai dengan tugas masing-masing instansi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan dokumen perencanaan tidak otomatis menjamin efektivitas koordinasi antarinstansi jika tidak disertai mekanisme kerja kolaboratif yang kuat (Latifah dkk., 2024).

Hambatan lain dalam kolaborasi antar-OPD dalam penanggulangan banjir adalah kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi bersama yang terpadu. Masing-masing OPD pada umumnya memiliki sistem evaluasi internal sendiri-sendiri, tanpa adanya forum koordinatif untuk menilai capaian program secara kolektif. Akibatnya, keberhasilan penanggulangan banjir sering diukur dari perspektif sektoral, bukan dari hasil bersama seperti penurunan jumlah titik banjir atau peningkatan kapasitas infrastruktur drainase secara menyeluruh. Padahal, dalam konteks kebijakan publik yang kompleks, efektivitas program seharusnya diukur secara lintas lembaga dan berbasis hasil. Sejalan dengan pendapat Latifah dkk. (2024) serta Widiyarta (2024), keberhasilan upaya penanggulangan banjir pada dasarnya sangat ditentukan oleh seberapa baik koordinasi dan kerja sama antarinstansi dapat terjalin. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu juga menjadi hal penting agar program penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran BAPPERIDA menjadi sangat strategis karena lembaga ini memiliki fungsi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara terpadu. Secara normatif, BAPPERIDA diharapkan mampu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai OPD agar memiliki visi, arah kebijakan, serta prioritas program yang selaras dalam penanggulangan banjir. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut sering kali lebih bersifat administratif, yakni sebatas mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan tanpa memastikan keterpaduan substansi program lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BAPPERIDA sebagai koordinator pembangunan dengan peran aktual yang masih terbatas pada fungsi teknokratis (Nasir, 2023).

Fenomena lemahnya kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur fisik seperti saluran

drainase atau tanggul penahan air tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan risiko banjir. Kolaborasi multiaktor menjadi kunci untuk memastikan keselarasan antara pembangunan fisik, tata ruang, konservasi lingkungan, serta sistem mitigasi bencana (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, keberadaan Forum Katana yang awalnya dibentuk sebagai wadah komunikasi dan konsultasi masyarakat dalam isu kebencanaan di Bandar Lampung menjadi refleksi penting. Forum ini pernah berupaya menghubungkan aspirasi warga dengan kebijakan teknis OPD, tetapi belum terintegrasi secara sistematis ke dalam proses perencanaan formal. Kelemahan integrasi inilah yang memperlihatkan bahwa kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dan forum masyarakat belum berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan.

Namun, hingga saat ini sebagian besar penelitian tentang banjir di Bandar Lampung masih berfokus pada aspek teknis. Kajian yang menyoroti kondisi saluran drainase, potensi daerah resapan, dan perubahan tata guna lahan memang penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan akar persoalan banjir secara menyeluruh. Penelitian yang mendalami dimensi kelembagaan dan kolaborasi antar-OPD masih sangat terbatas. Padahal, efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstitusi yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya (Hapsari & Rahman, 2024).

Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah titik banjir di Bandar Lampung dalam empat tahun terakhir. Tanpa pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana OPD berkolaborasi dalam perencanaan, sulit untuk menjelaskan mengapa berbagai program penanggulangan banjir yang telah dijalankan belum menunjukkan hasil signifikan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, dengan fokus pada kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Fokus ini penting karena OPD merupakan aktor formal yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam hal ini, Forum Katana menjadi gambaran penting

yang memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya sudah mulai tumbuh, tetapi belum terserap secara efektif ke dalam sistem perencanaan pemerintahan. Hal tersebut menegaskan pentingnya desain kolaborasi yang mampu menjembatani antara lingkup pemerintahan dan masyarakat sipil dalam tata kelola banjir perkotaan.

Penelitian ini juga diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep *collaborative governance* dalam konteks pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perencanaan program penanggulangan banjir yang lebih efektif melalui peningkatan mekanisme koordinasi lintas sektor, pembangunan sistem informasi terpadu, serta penyelarasan prioritas antar-OPD. Selain itu, penguatan forum seperti Forum Katana dapat dijadikan contoh konkret bagaimana kolaborasi multiaktor dapat dilembagakan secara formal agar memiliki dampak kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung pada akhirnya tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau persoalan teknis infrastruktur, melainkan merupakan persoalan tata kelola kelembagaan yang kompleks. Keterpaduan antar- OPD menjadi faktor penentu agar kebijakan dan program penanggulangan banjir dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan banjir yang efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkotaan. Dalam konteks ini, Forum Katana bukan hanya mencerminkan semangat kolaborasi yang pernah tumbuh di tingkat lokal, tetapi juga menjadi simbol dari potensi kemitraan yang belum termanfaatkan sepenuhnya oleh struktur pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana bentuk, dinamika, serta tantangan kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir, serta bagaimana potensi forum partisipatif seperti Forum Katana dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata

kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar-OPD serta unsur non-pemerintah dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terlihat dari belum terintegrasinya sistem informasi, sistem drainase tidak memadai, hingga tidak adanya forum khusus mitigasi banjir yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pertanyaan penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung periode 2020-2024?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas implementasi kolaborasi dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung periode 2020-2024.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kolaborasi dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan tata kelola pemerintahan daerah serta ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks perencanaan program penanggulangan banjir yang berbasis kolaborasi multiaktor. Berikut manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam konteks pemerintahan daerah, terutama terkait implementasi kolaborasi multiaktor antara pemerintah dan non-pemerintah dalam penanggulangan banjir.
 - b) Dengan menggunakan penelitian deskriptif metode kualitatif, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memahami bagaimana kolaborasi antaraktor dijalankan dalam proses perencanaan kebijakan lingkungan dan kebencanaan.
 - c) Penerapan kerangka *Collaborative Governance Framework* Ansell & Gash (2008) dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teoritis model tersebut pada konteks lokal Indonesia, terutama untuk menilai sejauh mana *trust building*, *shared understanding*, dan *joint action* terbentuk dalam kolaborasi multiaktor di bidang perencanaan program penanggulangan banjir.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperkuat implementasi kolaborasi multiaktor, khususnya melalui peningkatan sinergi antar-OPD dan forum masyarakat seperti Forum Katana dalam proses perencanaan program penanggulangan banjir.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi OPD dan lembaga masyarakat untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih inklusif, dengan menekankan pentingnya integrasi informasi, partisipasi masyarakat, dan keselarasan tujuan antaraktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir.
- c) Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif di tingkat daerah, melalui pengembangan sistem informasi terpadu, pembentukan forum lintas aktor yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen risiko bencana.
- d) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perencanaan program penanggulangan banjir yang lebih partisipatif, mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan berkelanjutan.
- e) Selain itu, penelitian ini dapat menjadi model pembelajaran kebijakan lokal (*local policy learning model*) bagi daerah lain, sebagai praktik baik dalam membangun kolaborasi multiaktor yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah dalam menghadapi persoalan banjir perkotaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah

Kolaborasi dalam pemerintahan daerah muncul sebagai sebuah kebutuhan ketika masalah publik semakin kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Dalam konteks ini, isu banjir merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek teknis infrastruktur, tetapi juga tata ruang, lingkungan, dan kapasitas kelembagaan. Kondisi tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan secara aktif dan saling melengkapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu pengaturan di mana aktor-aktor negara dan non-negara terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berbasis konsensus, dan deliberatif untuk mengelola kebijakan publik maupun program. Definisi ini menegaskan bahwa kolaborasi tidak sekadar koordinasi administratif, melainkan interaksi yang intensif, partisipatif, dan berbasis komitmen bersama. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan ini dikenal sebagai *collaborative governance*, yaitu tata kelola yang menekankan pada hubungan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik.

Kolaborasi di tingkat daerah sering kali diwujudkan melalui kerja sama lintas OPD serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan (multiaktor) dalam proses perencanaan kebijakan. Setiap OPD memiliki mandat formal yang berbeda, tetapi seluruhnya saling berkaitan dalam menghadapi permasalahan publik. Misalnya, dalam isu banjir di Kota Bandar Lampung, BAPPERIDA berperan dalam perencanaan pembangunan lintas sektor, Dinas PU

bertanggung jawab pada infrastruktur drainase dan saluran air, BPBD fokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, sedangkan DLH mengelola aspek lingkungan dan daya dukung ekosistem.

Kota Bandar Lampung, di luar unsur pemerintah juga pernah memiliki forum kolaboratif masyarakat, yakni Forum Katana. Forum ini dahulu berperan sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintah dalam mengidentifikasi potensi risiko bencana, termasuk banjir. Meskipun inisiatif ini sempat menjadi contoh awal kolaborasi lintas aktor di tingkat kota, keberadaannya kini sudah tidak aktif dan belum diintegrasikan secara kelembagaan dalam sistem perencanaan daerah. Hilangnya keberlanjutan forum ini mencerminkan belum kuatnya penguatan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan risiko banjir.

Meskipun keberadaan forum masyarakat bersifat sementara, pengalaman Katana menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan lebih dari sekadar koordinasi internal antar-OPD. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kolaboratif yang berkelanjutan, mampu memfasilitasi komunikasi antaraktor, dan menjamin partisipasi masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan Seftiyana & Alwi (2024) bahwa efektivitas kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun sinergi lintas sektor, serta Juniyanto (2022) yang menekankan pentingnya saling ketergantungan, komunikasi terbuka, dan tujuan kolektif yang disepakati bersama.

Teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut mereka, *collaborative governance* adalah suatu tata kelola di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang diformalkan, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada empat aspek utama, yaitu: kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses

kolaboratif (*collaborative process*).

Penerapan empat indikator *Collaborative Governance* pada kasus Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kolaborasi multiaktor dalam perencanaan penanggulangan banjir masih menghadapi berbagai hambatan. Pada aspek *starting conditions*, hubungan antar-OPD belum sepenuhnya didukung rasa saling percaya karena masih kuatnya kepentingan masing-masing instansi, sementara data dan informasi banjir tersebar di berbagai instansi tanpa mekanisme integrasi yang jelas; situasi ini diperburuk dengan tidak aktifnya Forum Katana yang sebelumnya menjadi ruang partisipatif masyarakat. Dari sisi *institutional design*, belum terdapat forum formal yang mampu mengatur pertukaran data lintas sektor maupun menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat, sehingga desain kelembagaan belum mampu menopang proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Pada indikator *facilitative leadership*, peran kepemimpinan kolaboratif yang seharusnya dijalankan oleh kepala daerah dan BAPPERIDA masih bersifat administratif dan belum mampu menjembatani kepentingan OPD secara konsisten, terutama dalam menjaga keberlanjutan forum lintas aktor. Sementara itu, *collaborative process* belum berkembang menjadi praktik rutin karena dialog, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan bersama cenderung berlangsung secara sesekali tanpa mekanisme kolaborasi yang terlembaga.

Perspektif teori yang digunakan bahwa konsep kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan serius. Kolaborasi belum berjalan sesuai prinsip *Collaborative Governance* karena keterbatasan pada aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, maupun proses kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana kolaborasi multiaktor dalam perencanaan penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung selama periode 2020-2024 termasuk pengalaman keberadaan Forum Katana di masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam memperkuat tata kelola penanggulangan banjir yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan

berkelanjutan.

2.2. Konsep Multiaktor dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Konsep multiaktor dalam kajian tata kelola pemerintahan merujuk pada keterlibatan lebih dari satu aktor dengan peran dan kewenangan yang berbeda dalam suatu proses kebijakan publik. Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa multiaktor merupakan kondisi tata kelola di mana berbagai organisasi dengan kapasitas dan kepentingan yang beragam harus bekerja sama secara deliberatif untuk menghadapi masalah publik yang kompleks. Selaras dengan itu, Seftiyana & Alwi (2024) melalui kajiannya menunjukkan bahwa keberhasilan *governance* sangat dipengaruhi oleh sinergi multiaktor yang terjalin melalui interaksi, koordinasi, serta komitmen bersama dalam proses kebijakan publik.

Konsep multiaktor di level pemerintahan daerah tidak selalu melibatkan sektor swasta atau masyarakat sipil, tetapi dapat dipahami sebagai kolaborasi antar-OPD. Setiap OPD memiliki mandat formal dan kewenangan yang spesifik, sementara masalah publik yang kompleks, seperti banjir, tidak bisa diselesaikan secara individu. Juniyanto (2022) menegaskan bahwa kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik dengan prinsip *governance*, administrasi, otonomi, mutualitas, dan norma yang mendasari interaksi tersebut.

Aktor utama yang terlibat dalam konteks penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung adalah BAPPERIDA, PU, BPBD, dan DLH. BAPPERIDA berperan sebagai koordinator program lintas sektor, menggabungkan program penanggulangan banjir ke dalam RPJMD dan RKPD serta menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya antar-OPD. PU bertanggung jawab terhadap penyediaan infrastruktur fisik, seperti drainase, saluran air, dan pengaturan tata ruang, sehingga menjadi pelaksana teknis utama dalam mengurangi risiko banjir. BPBD memiliki mandat dalam

mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana, termasuk perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko banjir secara kolaboratif. Sementara itu, DLH berfokus pada aspek ekologi dan keberlanjutan, seperti pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan daerah resapan air, sampah, dan kualitas lingkungan yang mendukung daya dukung ekosistem kota.

Perbedaan tugas dan fungsi antar-OPD menunjukkan adanya pembagian peran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, keterkaitan antarbidang kerja tersebut menuntut adanya keterlibatan lintas OPD dalam perumusan program. Ketika keterlibatan tersebut belum berjalan optimal, kebijakan cenderung dirumuskan secara masing-masing instansi, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta hasil kebijakan yang belum optimal. Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi multiaktor bergantung pada kemampuan aktor untuk berbagi informasi, membangun rasa saling percaya, dan menjalin komitmen bersama terhadap tujuan kolektif.

Dinamika kolaborasi multiaktor di Kota Bandar Lampung dapat dipahami dengan memperhatikan periode waktu antara 2020 hingga 2024. Pada periode 2020-2022, sebelum Forum Katana beroperasi, kolaborasi antar-OPD masih terbatas pada mekanisme internal pemerintah, sehingga perencanaan program penanggulangan banjir cenderung berjalan secara terpisah antarinstansi dan koordinasi lebih bersifat administratif. Pada 2023, Forum Katana berfungsi sebagai ruang komunikasi antara masyarakat, BPBD, dan OPD teknis, memberikan kesempatan bagi OPD untuk menerima masukan langsung dari masyarakat dan meningkatkan integrasi program. Namun, forum ini hanya berlangsung singkat dan tidak berlanjut pada tahun berikutnya, sehingga dampak jangka panjang terhadap koordinasi multiaktor tetap terbatas.

Kolaborasi multiaktor tahun 2024 ketika Katana tidak aktif kembali bergantung pada koordinasi internal antar-OPD. BAPPERIDA tetap berperan sebagai integrator program, Dinas PU sebagai pelaksana teknis infrastruktur dan tata ruang, BPBD menangani mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, dan

DLH mengelola aspek lingkungan yang mempengaruhi risiko banjir. Tanpa mekanisme kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara berkelanjutan, program penanggulangan banjir cenderung berjalan secara terpisah antarinstansi dan kurang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Konsep multiaktor antar-OPD di Kota Bandar Lampung dengan demikian dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang terus berkembang, dipengaruhi oleh keberadaan forum masyarakat. Periode keberadaan Forum Katana pada 2023 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi, sedangkan periode sebelum dan setelah forum menyoroti tantangan koordinasi internal OPD yang masih berjalan secara terpisah antarinstansi dan belum terhubung dengan baik. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi pengembangan mekanisme kolaboratif yang stabil, melibatkan berbagai pihak, dan berkelanjutan agar perencanaan program penanggulangan banjir lebih menyeluruh dan mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

2.3. Teori *Collaborative Governance*

Teori *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik yang bersifat kompleks memerlukan keterlibatan aktor yang beragam dalam suatu proses yang terstruktur, formal, dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama. Pendekatan ini relevan untuk memahami perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung, karena persoalan banjir bukan hanya persoalan teknis infrastruktur, tetapi terkait pula dengan aspek tata ruang, kapasitas lingkungan, mitigasi risiko, dan koordinasi antar sektor.

Ansell & Gash (2008) dalam kerangka ini merumuskan enam kriteria utama yang menentukan apakah suatu proses dapat dikategorikan sebagai proses kolaboratif. Selain itu, mereka juga menjelaskan empat indikator inti

yang menggambarkan bagaimana proses kolaboratif berlangsung. Kedua perangkat teori ini digunakan untuk menganalisis pola kolaborasi antar-OPD selama periode 2020-2024, termasuk dinamika sebelum, ketika, dan setelah keberadaan Forum Katana pada tahun 2023.

2.3.1. Enam Kriteria *Collaborative Governance* dalam Konteks Kota Bandar Lampung

Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa terdapat enam kriteria utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu proses dapat dikategorikan sebagai bentuk *collaborative governance*. Keenam kriteria tersebut mencerminkan unsur dasar dari kolaborasi yang efektif, mulai dari siapa yang memprakarsai kerja sama hingga tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan publik. Berdasarkan kerangka tersebut, penerapan kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung dapat dianalisis melalui enam kriteria berikut.

1. Diprakarsai oleh Lembaga publik

Kolaborasi penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung sepenuhnya diprakarsai oleh lembaga pemerintah daerah. BPBD menjadi koordinator utama dalam penanganan bencana, sementara BAPPERIDA berperan dalam perencanaan program dan integrasi lintas-OPD. Mekanisme seperti rapat koordinasi, penyusunan RKPD, serta instruksi teknis merupakan inisiatif institusi publik. Pada 2023, pembentukan Forum Katana juga diprakarsai oleh BNPB sebagai institusi publik di tingkat pusat.

2. Melibatkan aktor non-negara

Keterlibatan aktor non-negara tidak muncul secara konsisten sepanjang periode penelitian. Pada 2020-2022 dan 2024, kolaborasi berlangsung terutama antar-OPD sehingga partisipasi

non-negara relatif terbatas. Namun pada 2023, Forum Katana menghadirkan unsur masyarakat yang terlibat dalam pemetaan risiko dan penguatan kapasitas. Keterlibatan ini memang tidak bertahan lama, tetapi tetap menunjukkan bahwa pada periode tertentu bandar Lampung memenuhi syarat kedua.

3. Keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan teknis dan strategis terkait penanggulangan banjir berada di tangan OPD melalui rapat formal dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. OPD seperti BPBD, PU, DLH, dan BAPPERIDA terlibat langsung dalam menentukan prioritas program dan pembagian tanggung jawab. Sementara itu, peserta Forum Katana hanya memberikan masukan tanpa memiliki kewenangan dalam keputusan final. Karena itu, keterlibatan langsung terutama berasal dari OPD, sementara aktor non-negara memiliki kontribusi yang lebih bersifat konsultatif.

4. Dilaksanakan secara formal dan kolektif

Kolaborasi antar-OPD berlangsung melalui forum formal seperti rapat lintas-OPD, rapat koordinasi penanganan banjir, serta pertemuan yang diselenggarakan ketika terjadi bencana. Forum Katana pada 2023 juga memiliki struktur formal dan pertemuan terjadwal. Dari segi formalitas dan keterlibatan bersama dalam forum, kriteria ini terpenuhi baik dalam mekanisme internal pemerintah maupun dalam momen kolaboratif pada 2023.

5. Berorientasi pada konsensus

Rapat lintas-OPD umumnya diarahkan untuk mencapai kesepakatan mengenai intervensi prioritas, langkah teknis, serta pembagian peran. Namun, bentuk konsensus yang terjadi lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didasarkan pada

analisis risiko bersama yang menyeluruh. Pada masa keberadaan Forum Katana, masukan masyarakat memang menambah informasi lapangan, tetapi tidak mengubah pola pengambilan keputusan yang tetap terpusat pada OPD. Dengan demikian, orientasi pada konsensus memang ada, tetapi belum kuat dalam tahap perencanaan jangka panjang.

6. Berfokus pada kebijakan atau manajemen publik

Kolaborasi antar-OPD di Kota Bandar Lampung seluruhnya diarahkan untuk menyusun kebijakan dan manajemen penanggulangan banjir, mulai dari perencanaan infrastruktur drainase, pengelolaan lingkungan, mitigasi risiko, hingga penanganan darurat. Forum Katana pada 2023 juga berorientasi pada penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bagian dari kebijakan publik. Kriteria ini merupakan yang paling kuat terpenuhi sepanjang periode penelitian.

2.3.2. Empat Indikator Inti *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008)

1. *Starting Conditions*: Kondisi Awal Kolaborasi

Kondisi awal mencakup tingkat kepercayaan antar aktor, pembagian kekuasaan, ketergantungan antar organisasi, dan sejarah hubungan sebelumnya. Pada 2020-2022, kolaborasi antar-OPD masih ditandai oleh karakter masing-masing instansi sehingga pertukaran informasi dan integrasi program belum optimal. Pada 2023, keberadaan Forum Katana menghadirkan masukan tambahan dari kelurahan dan masyarakat, tetapi tidak secara signifikan mengubah pola hubungan antar-OPD. Memasuki 2024, kondisi awal kembali didominasi koordinasi internal pemerintah dengan pola hubungan yang lebih mengandalkan komando daripada kolaborasi setara.

2. *Institutional Design*: Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan di Kota Bandar Lampung sudah terbentuk melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) kebencanaan, alur pelaporan dari kelurahan dan kecamatan, serta struktur peran OPD. Namun desain tersebut lebih kuat pada fase respon bencana dibandingkan perencanaan. Sampai saat ini belum terdapat forum permanen yang secara rutin mempertemukan OPD terkait dalam satu ruang diskusi bersama untuk merumuskan rencana bersama. Forum Katana memang memberikan tambahan desain kelembagaan pada 2023, tetapi tidak menjadi bagian tetap dalam sistem pemerintah daerah.

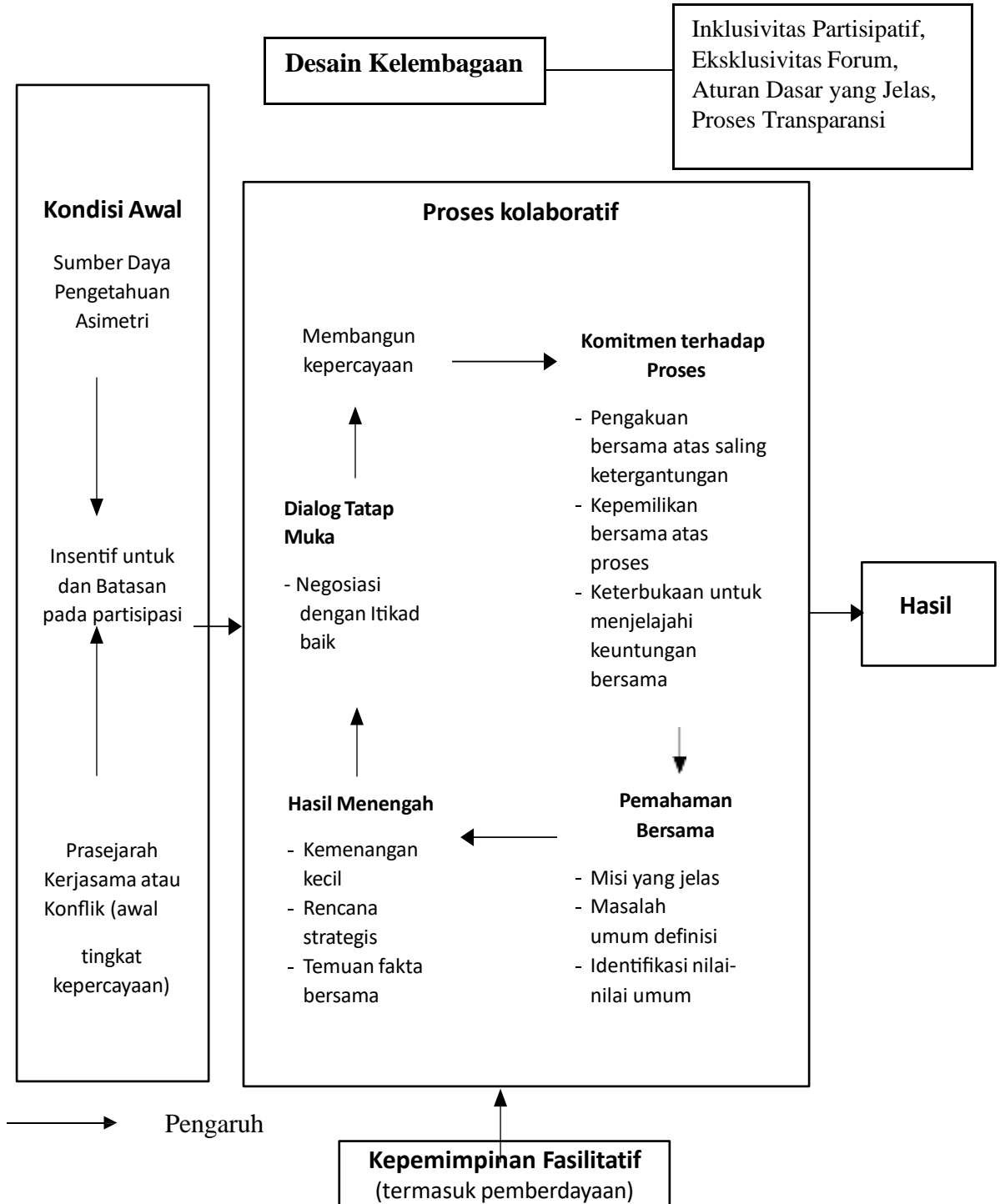
3. *Facilitative Leadership*: Kepemimpinan Fasilitatif

BPBD berperan sebagai pemimpin fasilitatif terutama ketika penanganan bencana membutuhkan koordinasi cepat. BAPPERIDA memegang fungsi fasilitatif pada tahap perencanaan program. Namun, kepemimpinan fasilitatif belum muncul secara kuat pada fase perencanaan bersama, karena koordinasi lintas-OPD masih sangat bergantung pada instruksi pimpinan atau kebutuhan situasional. Hal ini menjadikan proses kolaborasi lebih bersifat menunggu terjadinya permasalahan dibandingkan dilakukan secara lebih awal melalui perencanaan.

4. *Collaborative Process*: Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif mencakup dialog, pertukaran informasi, pembentukan kepercayaan, penyusunan agenda bersama, serta tercapainya hasil antara. Sepanjang 2020-2024, proses dialog antar-OPD memang berlangsung, tetapi intensitasnya lebih tinggi ketika penanganan kedaruratan dibandingkan pada tahap perencanaan. Pertukaran data belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses kolaboratif belum melahirkan *intermediate*

outcomes yang berkelanjutan seperti basis data bersama atau rencana lintas-OPD yang konsisten dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Model Tata Kelola Kolaboratif.
Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

2.3.3. Analisis Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori *Collaborative Governance* memberikan kerangka analitis yang memadai untuk menelaah dinamika kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung pada periode 2020-2024. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa penanganan banjir cenderung berjalan secara terpisah antarinstansi dan lebih banyak dilakukan setelah masalah terjadi, yakni karena faktor-faktor struktural dan proses yang memengaruhi interaksi antaraktor. Pada tahap awal (2020-2022), relasi antar-OPD lebih banyak berlangsung melalui mekanisme administratif; integrasi data dan perencanaan lintas sektor belum mapan, sehingga keputusan program sering terbentuk tanpa pertukaran informasi yang memadai. Munculnya Forum Katana pada 2023 sempat membuka ruang dialog yang melibatkan unsur masyarakat dan aktor lokal lainnya, sehingga memberikan tambahan informasi lapangan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan banjir; namun ketidakberlanjutan forum menjadi bukti bahwa momentum kolaboratif itu bersifat sementara. Pada 2024 hubungan kelembagaan kembali bergeser ke jalur internal antar-OPD, di mana pelaporan darurat melalui lurah/camat dan instruksi pimpinan menjadi mekanisme utama respons, tetapi upaya integrasi perencanaan jangka panjang masih lemah.

Keterkaitan antara temuan empiris dan empat indikator Ansell & Gash (2008) jelas terlihat. Kondisi awal (*starting conditions*) yang didominasi pola yang berjalan secara terpisah antarinstansi dan rendahnya integrasi informasi menghambat pembentukan kepercayaan yang kuat antar instansi; desain kelembagaan (*institutional design*) belum menyediakan forum permanen yang mengikat OPD untuk berkolaborasi secara rutin; kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) yang diperlukan untuk memediasi

kepentingan dan menjaga kesinambungan proses kolaboratif masih bersifat situasional; dan proses kolaboratif (*collaborative process*) masih banyak berlangsung secara tidak berkelanjutan, lebih berfokus pada penanganan saat terjadi banjir daripada dilakukan secara terencana dalam kerangka perencanaan terpadu. Dengan demikian, penerapan teori ini menegaskan bahwa kegagalan mencapai perencanaan penanggulangan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknis, tetapi juga oleh lemahnya kolaborasi multiaktor antarinstansi terkait.

Pendekatan analitis ini sekaligus menunjukkan arah perbaikan kebijakan, memperkuat desain kelembagaan yang mengikat partisipasi OPD dan masyarakat, membangun mekanisme pertukaran data lintas instansi, serta memperkuat kepemimpinan fasilitatif yang berkelanjutan serta langkah-langkah yang diperlukan agar kolaborasi antar-OPD tidak hanya terjadi pada momen tertentu tetapi terinternalisasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.

2.4. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa persoalan banjir di Kota Bandar Lampung tidak dapat dijelaskan semata melalui faktor teknis seperti kapasitas drainase, kondisi saluran, maupun persoalan alih fungsi lahan. Banjir yang terus berulang memperlihatkan adanya persoalan tata kelola yang lebih mendasar, terutama pada aspek koordinasi lintas instansi dan integrasi kebijakan di tingkat daerah. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan baik yang mengkaji kolaborasi antar-perangkat daerah, efektivitas koordinasi kebencanaan, maupun sinergi perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi kelembagaan. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa kolaborasi

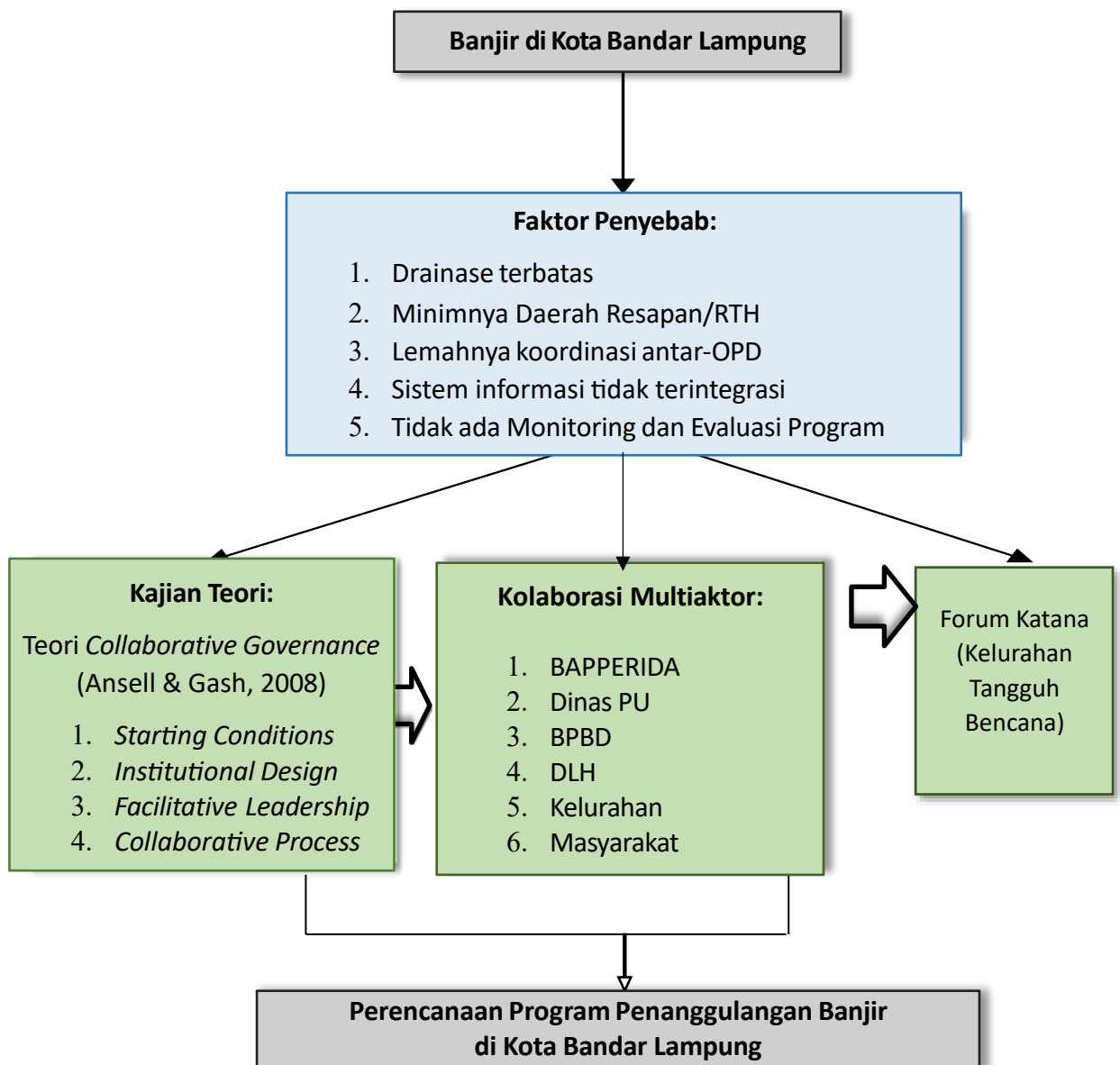
lintas-OPD menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perencanaan banjir yang komprehensif, karena persoalan banjir selalu melibatkan banyak sektor: infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, hingga kesiapsiagaan bencana.

Temuan penelitian sebelumnya tersebut sejalan dengan kondisi empiris di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dinamika kelembagaan yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan karakter kolaborasi di setiap periode. Pada 2020-2022, kolaborasi antar-OPD masih bersifat administratif dan belum ditopang mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur. Pada 2023, kehadiran Forum Katana menghadirkan momen partisipatif yang memperkuat komunikasi antara BPBD, kelurahan, masyarakat, dan aktor lokal lainnya, meskipun forum ini tidak melibatkan penuh seluruh OPD teknis dan tidak berlanjut sebagai kelembagaan permanen. Pada 2024, mekanisme kolaborasi kembali bertumpu pada koordinasi internal antar-OPD, terutama melalui prosedur pelaporan lurah dan camat serta instruksi pemerintah ketika terjadi banjir. Dinamika ini memperlihatkan bahwa kolaborasi multiaktor masih belum stabil, tidak merata antarinstansi, dan bergantung pada situasi tertentu.

Untuk memahami dinamika tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008). Teori ini memberikan empat indikator utama untuk menilai kualitas kolaborasi, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Melalui empat indikator ini, peneliti dapat menilai bagaimana kondisi awal antar-OPD, sejauh mana desain kelembagaan mendukung kolaborasi, seperti apa peran kepemimpinan fasilitatif dalam menghubungkan kepentingan instansi, serta bagaimana proses dialog dan pertukaran informasi berjalan dalam praktik.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika, hambatan, dan potensi kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung selama periode 2020-2024. Analisis diarahkan untuk melihat bagaimana

kualitas interaksi kelembagaan terbentuk sebelum, ketika, dan setelah keberadaan Forum Katana, serta bagaimana kondisi tersebut memengaruhi penyusunan program penanggulangan banjir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kolaborasi multiaktor di daerah sekaligus menjadi dasar bagi penguatan mekanisme koordinasi agar perencanaan penanggulangan banjir ke depan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.



Gambar 3. Kerangka Pikir.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Peta konseptual di atas menjelaskan hubungan logis antara faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung, peran aktor utama (BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH), serta kerangka teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Faktor penyebab seperti keterbatasan infrastruktur drainase, minimnya daerah resapan, lemahnya koordinasi antar-OPD, ketiadaan sistem informasi terpadu, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi program menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan tata kelola kelembagaan yang kompleks. Dengan demikian, solusi teknis semata tidak cukup, diperlukan pendekatan kolaboratif yang mampu menyatukan peran berbagai OPD secara terstruktur dan berkesinambungan.

Keempat OPD dalam konteks ini memiliki posisi yang sangat strategis. BAPPERIDA berfungsi sebagai penghubung lintas sektor melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah, PU bertanggung jawab pada infrastruktur drainase dan penataan ruang, BPBD berperan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, sementara DLH memastikan aspek lingkungan, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau tetap terjaga. Oleh karena itu, teori *Collaborative Governance* dengan empat indikatornya: *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi telah berlangsung serta hambatan apa saja yang dihadapi.

Penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan kondisi banjir atau peran OPD secara individual, tetapi lebih jauh untuk mengeksplorasi dinamika interaksi antar-OPD, pola koordinasi yang terbentuk, serta peluang penguatan kolaborasi di masa depan. Melalui peta konseptual ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi multiaktor dapat menjadi kunci dalam merumuskan strategi penanggulangan banjir yang lebih terhubung antarinstansi, efektif, dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung selama periode 2020-2024. Persoalan banjir yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan serta dinamika kelembagaan yang dibahas dalam tinjauan pustaka menunjukkan bahwa fenomena ini tidak bersifat sederhana dan tidak dapat direduksi ke dalam angka semata, ia menuntut pemahaman terhadap proses, interaksi, dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana relasi antar-institusi terbentuk, bagaimana mekanisme koordinasi berlangsung, serta bagaimana kebijakan dirumuskan dalam konteks pemerintahan daerah.

Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti dibandingkan pada penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan para informan mengenai pola koordinasi, pertukaran informasi, dan pengalaman praktik mereka dalam menyusun program penanggulangan banjir. Pendekatan tersebut relevan dengan fokus penelitian pada interaksi multiaktor khususnya BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH yang membutuhkan analisis berbasis perspektif, narasi, dan praktik keseharian para pemangku kepentingan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” kolaborasi antar-OPD berjalan dalam konteks perencanaan program penanggulangan banjir di Bandar Lampung. Baxter & Jack (2008) menegaskan bahwa metode kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara jelas; pendekatan ini memungkinkan penelusuran proses, aktor, dan konteks yang saling memengaruhi. Kondisi di Kota Bandar Lampung termasuk peningkatan titik banjir, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakselarasan kebijakan antar-institusi menggambarkan fenomena kompleks yang membutuhkan kajian yang mendalam terhadap kondisi yang terjadi.

Penelitian ini secara deskriptif berupaya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pola interaksi antar-OPD, mekanisme koordinasi yang berlangsung pada tiga periode kajian (2020-2022 sebelum adanya Forum Katana, 2023 ketika Forum Katana aktif, dan 2024 setelah forum tidak berlanjut), serta kendala kelembagaan yang menghambat integrasi perencanaan. Pendekatan ini selaras dengan kerangka teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) yang menekankan analisis atas kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan dinamika proses kolaboratif.

Kombinasi penelitian deskriptif dan metode kualitatif tepat digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kolaborasi antar-OPD terbentuk dan mengapa upaya perencanaan program penanggulangan banjir masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi empiris terhadap pemahaman kolaborasi multiaktor di tingkat daerah sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih terkoordinasi antarinstansi dan mampu menjawab kebutuhan yang ada.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana kolaborasi antar-OPD terbentuk dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung pada periode 2020-2024. Penelitian menelaah dinamika hubungan kelembagaan antara empat OPD utama BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda tetapi saling bergantung dalam upaya penyusunan kebijakan penanggulangan banjir. Keempat instansi tersebut memegang peran strategis pada aspek perencanaan, infrastruktur teknis, mitigasi bencana, serta pengelolaan lingkungan, sehingga efektivitas koordinasi dan komunikasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan kebijakan.

Penelitian ini tidak hanya menelusuri bagaimana koordinasi antar-OPD berlangsung, tetapi juga bagaimana perubahan dinamika kelembagaan terjadi pada tiga periode penting: (1) tahun 2020-2022 ketika kolaborasi masih terbatas pada mekanisme internal pemerintah, (2) tahun 2023 ketika Forum Katana sempat menyediakan ruang komunikasi antara BPBD, kelurahan, dan masyarakat meskipun tidak melibatkan penuh OPD teknis, serta (3) tahun 2024 ketika forum tersebut tidak lagi aktif dan koordinasi kembali bertumpu pada prosedur internal pemerintah seperti pelaporan lurah dan camat serta instruksi pimpinan. Ketiga periode ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kolaborasi antaraktor pemerintah berkembang dan sejauh mana forum atau mekanisme tertentu mampu memperkuat atau justru tidak memberi dampak signifikan terhadap integrasi perencanaan.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008) yang memuat empat indikator utama yang menjadi dasar analisis:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Indikator ini mencakup tingkat kepercayaan antarinstansi, pengalaman kerja sama sebelumnya, serta kesenjangan sumber daya dan kewenangan. Dalam konteks Bandar Lampung, kondisi awal sangat menentukan karena hubungan antar-OPD sebelum kolaborasi dimulai masih ditandai dengan pola kerja yang berjalan secara terpisah antarinstansi dan keterbatasan integrasi data banjir, sehingga perlu dianalisis bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kesiapan instansi untuk bekerja sama.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Indikator ini melihat bagaimana aturan, struktur rapat, dan mekanisme koordinasi dirancang untuk mendukung kolaborasi. Dalam penelitian ini, perhatian diberikan pada peran BAPPERIDA sebagai koordinator perencanaan, keberadaan struktur formal lintas instansi, serta sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjamin kesinambungan koordinasi termasuk dinamika sementara yang muncul melalui Forum Katana pada 2023.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Indikator ini menilai kemampuan pimpinan daerah dan pimpinan OPD dalam menjembatani perbedaan kepentingan, membuka ruang dialog, dan menjaga kelancaran proses kolaborasi. Analisis diarahkan untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan mempengaruhi koordinasi antar-OPD, terutama pada situasi ketika forum kolaboratif masyarakat tidak lagi aktif.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Indikator ini mencakup dinamika interaksi berupa dialog tatap muka, pertukaran informasi, pengambilan keputusan bersama, dan pembentukan komitmen bersama. Penelitian berfokus pada bagaimana proses tersebut berlangsung dalam praktik, apakah ada kesepakatan tujuan yang

dibangun, serta bagaimana instansi menanggapi hambatan kelembagaan yang muncul selama periode penelitian.

Fokus penelitian ini tidak membahas perhitungan teknis hidrologi, kapasitas drainase, ataupun evaluasi fisik infrastruktur, karena penelitian diarahkan pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Melalui kerangka *Collaborative Governance*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai cara OPD berkoordinasi dalam merumuskan program penanggulangan banjir, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas maupun kelemahan kolaborasi di tingkat pemerintah daerah.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, yakni ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi ini relevan dengan permasalahan penelitian dan memiliki fenomena sosial yang unik untuk dikaji (Sugiyono, 2013). Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial di Lampung. Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, permasalahan banjir di Bandar Lampung berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari kualitas pelayanan publik, stabilitas ekonomi, hingga aspek lingkungan hidup.

Fenomena banjir di Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik yang melibatkan berbagai aspek. Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah titik banjir meningkat tajam dari 35 titik pada tahun 2020 menjadi 120 titik pada tahun 2024, dengan sebaran yang mencakup 52 kelurahan di 16 kecamatan, BPBD (2025). Lonjakan ini menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur drainase, tetapi juga kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, terutama koordinasi lintas instansi. Hal ini sejalan dengan pandangan Baxter & Jack (2008) yang

menegaskan bahwa pemilihan lokasi penelitian dalam studi kasus harus mempertimbangkan kompleksitas fenomena yang sedang berlangsung.

Bandar Lampung juga memiliki posisi penting sebagai wilayah pesisir dengan topografi yang bervariasi. Perubahan penggunaan lahan yang cukup besar, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan meningkatnya alih fungsi daerah resapan menjadi permukiman memperparah kerentanan kota terhadap banjir. Oleh sebab itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya pengendalian banjir dan sekaligus memperkaya kajian akademis mengenai *Collaborative Governance* dalam konteks pemerintah daerah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan unsur utama yang menjadi dasar analisis untuk memahami fenomena sosial; data kualitatif umumnya berbentuk deskripsi, narasi, dokumen, observasi, ataupun representasi simbolik yang mencerminkan makna sosial di lapangan (Abdussamad, 2021). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang cenderung mengandalkan data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman makna dan pemahaman terhadap kondisi yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Menurut Sugiyono (2013) data kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik secara langsung melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan partisipan (data primer), maupun secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, serta literatur yang relevan (data sekunder). Hal ini juga dijelaskan oleh Sanahan (2024) tentang tata kelola kolaboratif dalam perencanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang, bahwa pengumpulan data yang mendalam dan valid menjadi kunci keberhasilan pemahaman fenomena sosial, sehingga peneliti memanfaatkan kombinasi antara data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan data sekunder yang didukung oleh dokumen dan arsip terkait sebagai

sumber pelengkap.

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditetapkan, dengan tujuan memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan faktual yang berkaitan dengan peran aktor, mekanisme perencanaan, serta proses kolaborasi yang berlangsung selama periode penelitian.

Peneliti menggunakan dua sumber data utama dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan dan pengamatan terhadap situasi yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dalam proses perencanaan, yaitu berasal dari BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH.

Data primer yang dikumpulkan meliputi:

1) Peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah

Data ini berkaitan dengan bagaimana BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH menjalankan peran dan kewenangannya dalam perencanaan program penanggulangan banjir, serta bentuk koordinasi yang dilakukan antarperangkat daerah.

2) Pola dan mekanisme kolaborasi antaraktor

Data ini mencakup bentuk interaksi, koordinasi, dan kerja sama yang terbangun antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan banjir, termasuk keterlibatan aktor non-pemerintah.

3) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi

Data ini berkaitan dengan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan kolaborasi multiaktor dalam perencanaan penanggulangan banjir.

b. Data Sekunder

Menurut Santosa (2014) data sekunder memiliki fungsi penting dalam penelitian kualitatif sebagai penyokong validitas data primer. Data sekunder ini berperan memperkuat, memperluas, serta memvalidasi informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan interaksi dengan partisipan. Penggunaan data sekunder berupa dokumen, arsip, dan literatur yang relevan dianggap krusial untuk memperdalam analisis dan memastikan keandalan hasil penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan pihak yang memberikan informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2013) pemilihan partisipan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive*, yakni memilih informan yang memiliki pengalaman relevan, keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti, serta kesediaan untuk memberikan informasi secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan

informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Dengan teknik ini, peneliti dapat memilih individu yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yakni dinamika kolaborasi antar-OPD dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.

1. Kriteria Pemilihan Informan

Agar sesuai dengan fokus penelitian, kriteria pemilihan informan ditentukan secara jelas. Adapun kriteria tersebut adalah:

- a. Keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, kolaborasi, atau implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.
- b. Memiliki kewenangan atau peran strategis di OPD masing-masing sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tugas, fungsi, dan tantangan institusi.
- c. Menguasai informasi teknis maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian banjir, baik dari sisi perencanaan, infrastruktur, mitigasi bencana, maupun lingkungan hidup.
- d. Kesiediaan untuk diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka kepada peneliti.

Peneliti membatasi jumlah informan hanya enam orang berdasarkan kriteria tersebut, dengan asumsi bahwa informasi dari enam informan kunci ini sudah cukup representatif dan mendalam. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman informasi dibandingkan dengan jumlah informan (Baxter & Jack, 2008).

2. Daftar Informan Penelitian

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama/Instansi	Bidang	Jabatan Informan	Alasan Pemilihan
1	Fitriyanti-BAPPERIDA	Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang	Koordinator perencanaan infrastruktur dan integrasi program banjir lintas sektor
2	Salahuddin-Dinas PU	Sumber Daya Air	Fungsional Pemeliharaan Drainase dan Talu Sungai	Penanggung jawab Pembangunan dan pemeliharaan drainase kota
3	Gustriyansyah-BPBD	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang	Penyusun peta risiko, strategi mitigasi, dan program kesiapsiagaan banjir
4	Lena Maryana-DLH	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Penelaah Teknis Kebijakan Tata Lingkungan	Pengelola ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan untuk mitigasi banjir
5	Muhali Joko dan Wiwik-Kelurahan Bumi Waras	Pemerintahan Kelurahan	Lurah dan Kader Posyandu (Pernah terlibat dalam Forum Katana)	Penggerak koordinasi awal di tingkat masyarakat, dan memiliki pengalaman langsung terkait proses komunikasi antara masyarakat dengan OPD, terutama pasca-aktifnya Forum Katana dan pada fase 2024 ketika koordinasi lebih banyak melalui lurah dan camat.
6	Sukardi	Masyarakat	Perwakilan	Menggali

Warsito- Masyarakat di Kelurahan Bumi Waras	dan Pengalaman terkait Banjir	masyarakat terlibat dan terdampak	pengalaman langsung masyarakat mengenai banjir, alur komunikasi dengan kelurahan atau OPD, serta persepsi tentang efektivitas program pemerintah dan keberadaan forum kolaboratif seperti Katana tahun 2023
--	-------------------------------------	---	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas data yang diperoleh akan menentukan kedalaman analisis dan kredibilitas hasil penelitian. Menurut Baxter & Jack (2008) pengumpulan data kualitatif tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga berfungsi untuk memahami makna, pengalaman, serta interaksi sosial yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

Sugiyono (2013) menekankan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara naturalistik, yaitu peneliti terjun langsung ke dalam situasi alami yang dialami partisipan. Dengan cara ini, peneliti dapat menyesuaikan diri pada konteks nyata dan menangkap dinamika sosial yang autentik sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi resmi. Pemilihan dua teknik ini dilakukan untuk saling melengkapi sehingga menghasilkan data yang lebih valid melalui mekanisme triangulasi. Nurfajriani dkk. (2024) menegaskan bahwa triangulasi menjadi strategi penting untuk menjamin kredibilitas

temuan penelitian kualitatif.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi dari para informan kunci. Menurut Sugiyono (2013) wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, karena mampu memberikan informasi yang detail dan mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta interpretasi informan terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan enam informan dari empat OPD BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, DLH serta kelurahan dan masyarakat. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan namun tetap memberi ruang fleksibilitas agar informan dapat menjelaskan secara bebas sesuai pengalaman mereka.

Peneliti telah melakukan kegiatan turun lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih yang dianggap relevan dan memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi kerja masing-masing informan serta di wilayah kelurahan yang memiliki kerawanan banjir. Berikut uraian pelaksanaan wawancara lapangan beserta informan yang diwawancarai oleh peneliti:

- 1) Pada tanggal 26 November 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari BAPPERIDA Kota Bandar Lampung di kantor BAPPERIDA pada pukul 11.00-13.00 WIB. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait peran BAPPERIDA dalam pengoordinasian perencanaan program penanggulangan banjir serta mekanisme perencanaan lintas

perangkat daerah.

- 2) Pada tanggal 8 Desember 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari DLH Kota Bandar Lampung di kantor DLH pada pukul 09.00-11.00 WIB. Wawancara difokuskan pada kontribusi DLH dalam pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengurangan risiko banjir.
- 3) Pada tanggal 15 Desember 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Dinas PU Kota Bandar Lampung di kantor Dinas PU pada pukul 12.00-14.00 WIB. Wawancara difokuskan pada aspek teknis perencanaan infrastruktur pengendalian banjir dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
- 4) Pada tanggal 17 Desember 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari unsur pemerintah kelurahan di salah satu kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan banjir pada pukul 10.00-12.00 WIB. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran kelurahan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan penanggulangan banjir.
- 5) Pada tanggal 17 Desember 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari unsur masyarakat yang berdomisili di wilayah rawan banjir pada pukul 12.00-14.00 WIB. Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam proses perencanaan serta pengalaman menghadapi banjir.
- 6) Pada tanggal 17 Desember 2025, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari BPBD Kota Bandar Lampung di kantor BPBD pada pukul 14.30-16.00 WIB. Wawancara ini membahas peran BPBD dalam mitigasi bencana banjir serta keterlibatannya dalam perencanaan kebencanaan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Namun demikian, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara berkelanjutan, sehingga kolaborasi multiaktor yang terbangun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data primer berupa pengalaman subjektif, persepsi, serta analisis dari para pejabat dan staf teknis yang terlibat langsung dalam program penanggulangan banjir.

2. Studi Dokumentasi Resmi

Teknik kedua adalah studi dokumentasi resmi, yakni pengumpulan data melalui dokumen-dokumen publik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menurut Bowe (2009) dokumen memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan data historis, kebijakan normatif, serta bukti administratif yang mendukung validitas temuan.

Dokumen resmi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026.
- 2) RKPD Kota Bandar Lampung 2023-2024.
- 3) Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung 2020-2025.
- 4) Berita resmi pemerintah daerah terkait rapat koordinasi antar-OPD (jika notulen tidak tersedia).

Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk:

- 1) Mengonfirmasi data hasil wawancara
- 2) Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan terkait penanggulangan banjir
- 3) Menjadi bukti objektif dari proses kolaborasi antar-OPD

3.7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara sistematis dan terpadu agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menempuh beberapa langkah teknis yang saling berkesinambungan, dimulai dari pemeriksaan data mentah, reduksi data, penyajian, hingga interpretasi dan verifikasi akhir.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Setelah seluruh data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi resmi, peneliti melakukan proses pemeriksaan data atau *editing* sebagai langkah awal pengolahan. Pada tahap ini, peneliti secara teliti membaca kembali transkrip wawancara dari beberapa OPD terkait yaitu BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, DLH, Kelurahan serta Masyarakat dan data dari dokumen pemerintah terkait Implementasi Kolaborasi untuk memastikan bahwa data yang direkam sudah lengkap, jelas, dan tidak mengandung kesalahan penulisan atau pencatatan. Proses ini penting agar tidak ada informasi penting yang terabaikan atau salah tafsir pada tahap selanjutnya.

Peneliti juga melakukan proses klarifikasi dengan menghubungi kembali informan apabila ditemukan data yang kurang jelas atau tidak konsisten. Selain itu, data yang bersifat duplikasi atau tidak relevan dipisahkan untuk menghindari kebingungan dalam analisis. *Editing* data ini menjadikan bahan analisis lebih tersusun dan siap digunakan untuk proses berikutnya.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahap analisis yang dilakukan untuk menautkan informasi yang diperoleh dengan pertanyaan dan

permasalahan penelitian, membandingkan temuan empiris dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, serta menelaah hubungan antaraktor dan mekanisme yang berlangsung dalam proses perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data, menilai konsistensi maupun perbedaan antar informasi, serta mengkaji kesesuaian dan ketidakesesuaian antara praktik yang terjadi dengan kerangka konseptual yang digunakan. Melalui proses tersebut, interpretasi data diarahkan untuk menghasilkan pemahaman analitis yang berbasis fakta empiris dan relevan dengan tujuan penelitian.

Peneliti melakukan interpretasi data dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung tahun 2020-2024 dengan fokus permasalahan penelitian, yaitu bagaimana implementasi kolaborasi antaraktor dijalankan, sejauh mana peran aktor pemerintah dan non-pemerintah terlibat dalam forum Katana, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kolaborasi multiaktor dalam proses perencanaan.

Interpretasi ini dilakukan terhadap data hasil wawancara dengan informan dari BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, DLH, pemerintah kelurahan, dan masyarakat, serta didukung oleh kajian dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan daerah terkait penanggulangan banjir. Peneliti kemudian mengkaji dan menafsirkan peran masing-masing aktor, pola hubungan yang terbentuk, serta mekanisme koordinasi dan partisipasi yang terjadi dalam perencanaan penanggulangan banjir. Proses interpretasi tersebut mengacu pada kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, khususnya untuk memahami kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan yang mendukung atau membatasi kolaborasi, peran kepemimpinan fasilitatif, serta dinamika proses kolaborasi yang

berlangsung selama periode penelitian.

Melalui tahapan interpretasi data ini, peneliti juga mengidentifikasi adanya perbedaan antara konsep kolaborasi yang diharapkan dalam perencanaan penanggulangan banjir dengan praktik yang terjadi di lapangan, seperti dominasi mekanisme birokratis, keterbatasan keberlanjutan forum kolaboratif, serta belum konsistennya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut, peneliti melakukan penafsiran data secara menyeluruh untuk menarik kesimpulan analitis mengenai karakteristik dan efektivitas implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Peneliti melakukan verifikasi melalui teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan hasil pengolahan data, dengan membandingkan data dari wawancara dan dokumen resmi pemerintah. Proses verifikasi ini menambah kredibilitas data dan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan. Untuk itu, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bukan hanya berdasar pada asumsi, melainkan didukung oleh bukti empiris yang kuat dan terpercaya.

3.8. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahap paling penting dalam penelitian kualitatif. Proses ini bukan sekadar mengolah informasi mentah, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung dalam data sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Baxter & Jack (2008) analisis data kualitatif adalah upaya untuk menata, mengorganisasikan, dan menafsirkan data secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena

yang diteliti.

Hal yang membedakan penelitian kualitatif dari kuantitatif adalah sifat analisisnya yang bersifat terus-menerus (iteratif) sejak awal peneliti memasuki lapangan. Menurut Sugiyono (2013) analisis data kualitatif dimulai sejak data pertama diperoleh melalui wawancara dan dokumen, kemudian segera diolah, ditafsirkan, dan dibandingkan dengan temuan lain. Proses analisis yang berlangsung paralel dengan pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus, memperdalam pertanyaan, dan mengarahkan pencarian data berikutnya secara lebih tepat.

Untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan model analisis data dari Baxter & Jack (2008) yang meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Membaca ulang transkrip wawancara dengan informan dari BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH
- 2) Menghubungkan data yang relevan dengan kerangka teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008).

Dengan reduksi data, informasi yang semula sangat banyak dan beragam dapat dipadatkan tanpa kehilangan substansinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap mengorganisasikan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Menurut Baxter & Jack (2008) penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, tabel, matriks, bagan, maupun peta konsep.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui:

- 1) Tabel ringkasan wawancara per OPD
- 2) Matriks perbandingan peran OPD dalam penanggulangan banjir
- 3) Bagan alur kolaborasi multiaktor dalam penyusunan kebijakan
- 4) Narasi deskriptif mengenai praktik kolaborasi yang ditemukan di lapangan.

Penyajian ini membantu peneliti menemukan pola (*pattern*), hubungan (*relationship*), serta perbedaan (*contrast*) di antara data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara dari data yang telah dianalisis, lalu melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara:

- 1) Menyusun proposisi sementara tentang praktik kolaborasi antar-OPD
- 2) Membandingkan kesimpulan awal dengan data baru yang masuk
- 3) Melakukan triangulasi dengan wawancara dan dokumen resmi

Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid, konsisten, dan berbasis pada data empiris.

3.9. Kekurangan Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian, peneliti menghadapi sejumlah keterbatasan yang muncul sejak tahap awal penyusunan hingga pengumpulan data di lapangan. Pada tahap awal, peneliti mengalami keterbatasan dalam menelusuri dan mengidentifikasi secara mendalam keterkaitan antara perencanaan program penanggulangan banjir dengan dokumen perencanaan daerah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap dokumen yang relevan serta belum lengkapnya informasi yang tersedia pada tahap pra-penelitian.

Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data di lapangan, peneliti juga menghadapi kendala dalam proses memperoleh informasi dari narasumber. Tidak semua informan dapat memberikan jawaban secara lengkap terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan, serta terdapat beberapa instansi yang membatasi proses dokumentasi wawancara, seperti tidak diperkenalkannya penggunaan alat perekam. Selain itu, proses administratif dalam pengajuan izin penelitian di beberapa instansi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga memengaruhi kelancaran pengumpulan data.

Keterbatasan yang paling signifikan dalam penelitian ini berkaitan dengan akses terhadap data, khususnya data mengenai hasil perencanaan, hasil kolaborasi antaraktor, serta *output* program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, diketahui bahwa data tersebut pada dasarnya tersedia di masing-masing OPD seperti BAPPERIDA, Dinas PU, BPBD, dan DLH. Namun, peneliti tidak dapat memperoleh data tersebut secara lengkap karena adanya keterbatasan akses administratif dan kebijakan internal instansi yang membatasi penyebaran data kepada pihak luar.

Selain itu, belum terdapat sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data antar OPD, sehingga data yang tersedia masih bersifat sektoral dan tersebar di masing-masing instansi. Kondisi ini menyebabkan peneliti tidak

dapat menyajikan data kuantitatif secara rinci mengenai capaian hasil perencanaan maupun *output* dari kolaborasi yang dilakukan selama periode penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data hasil wawancara, serta dokumen perencanaan yang dapat diakses, seperti RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan proses, bentuk, serta dinamika kolaborasi antaraktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir.

Dengan demikian, keterbatasan dalam penelitian ini tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pengelolaan data dan koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi, yang pada akhirnya turut memengaruhi proses perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung periode 2020-2024, serta dengan merujuk pada kerangka teori kolaborasi Ansell dan Gash, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Pertama, terkait tujuan untuk menganalisis implementasi kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung periode 2020-2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kolaborasi multiaktor telah berlangsung, namun belum didukung mekanisme kolaborasi yang stabil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara BAPPERIDA, BPBD, Dinas PU, dan DLH pada dasarnya telah memiliki dasar regulasi dan pembagian tugas yang jelas. Proses koordinasi dilakukan melalui rapat perencanaan, penyusunan dokumen RKPD, RPBD, serta forum lintas perangkat daerah. Akan tetapi, bentuk kerja sama yang terjadi masih lebih bersifat administratif dan sektoral. Setiap OPD menjalankan program sesuai tugas masing-masing, namun belum sepenuhnya menyusun perencanaan bersama yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih berada pada tahap koordinasi dan belum sampai pada integrasi kebijakan yang kuat dalam satu visi penanggulangan banjir jangka panjang.

Jika dilihat dari indikator *collaborative governance*, kondisi awal kolaborasi menunjukkan bahwa hubungan antar-OPD telah terbentuk secara struktural, namun belum sepenuhnya didukung oleh rasa saling percaya dan pemahaman

bersama yang kuat. Masih terdapat kecenderungan pendekatan sektoral dalam penyusunan program sehingga integrasi perencanaan belum terintegrasi secara menyeluruh. Dari sisi desain kelembagaan, belum terdapat forum kolaborasi yang bersifat permanen dan secara khusus membahas mitigasi banjir lintas OPD secara rutin. Mekanisme koordinasi lebih banyak terjadi ketika terjadi peristiwa banjir atau dalam agenda formal tahunan. Kepemimpinan fasilitatif dalam mendorong kolaborasi juga masih bersifat administratif dan situasional. Proses kolaborasi yang berlangsung belum menghasilkan sistem data terpadu maupun rencana bersama yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Dalam periode penelitian 2020-2024, keberadaan Forum Katana pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi kolaborasi yang melibatkan unsur masyarakat. Forum ini menunjukkan adanya upaya pemerintah, khususnya BPBD, untuk melibatkan masyarakat dalam identifikasi risiko dan kesiapsiagaan bencana di tingkat kelurahan. Terjadi dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kondisi banjir di wilayah masing-masing. Namun, Forum Katana hanya berlangsung dalam waktu tertentu dan belum terintegrasi secara langsung ke dalam mekanisme perencanaan lintas OPD di tingkat kota. Dengan demikian, Forum Katana tahun 2023 dapat diposisikan sebagai praktik kolaboratif partisipatif yang bersifat sementara dalam implementasi kolaborasi 2020-2024, dan belum berkembang menjadi forum permanen dalam sistem perencanaan daerah.

Kedua, terkait tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kolaborasi dalam perencanaan program penanggulangan banjir, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, struktur kelembagaan yang telah ditetapkan, serta pengalaman koordinasi antar-OPD dalam menangani banjir setiap tahun. Sementara itu, faktor penghambat meliputi belum adanya forum kolaborasi permanen lintas OPD, belum terintegrasinya sistem informasi

banjir, serta pola komunikasi yang masih bersifat administratif. Selain itu, tidak berlanjutnya Forum Katana setelah tahun 2023 menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat belum dilembagakan secara konsisten dalam sistem perencanaan daerah.

Selain itu, apabila dilihat dari aspek perencanaan pembangunan daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung sebenarnya telah memiliki arah kebijakan dan program yang cukup jelas dalam penanggulangan banjir. Hal ini tercermin dalam dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024, khususnya pada Misi 3 yang menekankan peningkatan daya dukung infrastruktur, dengan sasaran meningkatnya pengendalian banjir serta strategi pengurangan titik banjir dan luas genangan (RPJMD Kota Bandar Lampung 2020-2024, Bab I:21). Program tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan teknis seperti pengelolaan sumber daya air, pengembangan sistem drainase, serta normalisasi sungai yang dilaksanakan oleh Dinas PU.

Secara indikator kinerja, perencanaan tersebut juga telah menetapkan target yang terukur, seperti penurunan persentase daerah rawan banjir dari 60% pada tahun 2020 menjadi 35% pada akhir periode RPJMD, serta peningkatan kondisi drainase dan perlindungan kawasan permukiman dari risiko banjir (RPJMD Kota Bandar Lampung 2020-2024, Lampiran Indikator Kinerja). Hal ini menunjukkan bahwa secara dokumen perencanaan, output telah dirumuskan secara jelas dan terukur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi multiaktor dalam perencanaan penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung tahun 2020-2024 telah menunjukkan adanya upaya menuju tata kelola kolaboratif, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan pelaksanaan. Praktik kolaborasi yang ada memiliki kesesuaian parsial dengan kerangka teori Ansell dan Gash, tetapi memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, kepemimpinan, dan keberlanjutan proses kolaborasi agar dapat berkontribusi

secara lebih efektif dalam mendukung koordinasi dan keterpaduan perencanaan penanggulangan banjir.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk forum koordinasi lintas OPD yang bersifat lebih rutin dan terstruktur khusus dalam pembahasan mitigasi banjir. Forum ini dapat difungsikan sebagai ruang diskusi mendalam untuk menyatukan program, berbagi data, serta menyusun prioritas bersama secara berkelanjutan. Dengan adanya forum permanen, koordinasi tidak hanya terjadi saat kondisi darurat, tetapi juga dalam tahap perencanaan jangka panjang.

Kedua, pengalaman Forum Katana tahun 2023 perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan forum partisipatif semacam Katana ke dalam mekanisme perencanaan formal seperti musrenbang atau forum perangkat daerah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan daerah yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat terkait risiko banjir di tingkat lokal.

Ketiga, diperlukan pengembangan sistem informasi terpadu antar-OPD terkait data banjir, meliputi titik genangan, kondisi drainase, dan wilayah rawan risiko. Integrasi data ini penting untuk mendukung perencanaan berbasis data dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, peran BAPPERIDA sebagai koordinator perencanaan perlu diperkuat dalam menyatukan arah kebijakan antar-OPD agar tidak berjalan secara sektoral.

Melalui penguatan kelembagaan, integrasi data, serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan kolaborasi multiaktor dalam perencanaan program penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan proses kolaborasi antaraktor. Program dan indikator yang telah dirumuskan dalam RPJMD, seperti penurunan persentase daerah rawan banjir dan peningkatan kualitas sistem drainase, perlu diintegrasikan secara lebih jelas ke dalam mekanisme kolaborasi lintas OPD. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun rencana aksi bersama (*joint planning*) yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta didukung oleh pembagian peran yang lebih terstruktur.

Kelima, diperlukan penyusunan mekanisme *monitoring* dan evaluasi bersama yang tidak hanya menilai capaian program secara sektoral, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kolaborasi dalam mendukung pencapaian target penanggulangan banjir. Dengan adanya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kolaboratif, diharapkan program penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pengurangan risiko banjir di Kota Bandar Lampung.

Keenam, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji kolaborasi multiaktor dalam penanggulangan banjir dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui studi perbandingan antar daerah maupun dengan melibatkan aktor non-pemerintah yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah faktor keberlanjutan kolaborasi dari perspektif kebijakan, politik, dan kapasitas kelembagaan guna memperkaya kajian kolaborasi multiaktor di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Alhafid, Abel Andino. 2025. Kolaborasi dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atmojo, T. W., Rohayatin, T., & Sufianto, D. 2025. *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir Sungai Ciliwung di Jakarta Timur*. 1(2), 1-21.
- Austin, T., Hakim, A. R., & Rossa, C. A. 2025. Model Kolaboratif dalam Penanggulangan Risiko Banjir di Kabupaten Lahat. 14(1), 16-24.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. BNPB.
- Baxter, P., & Jack, S. 2008. *Qualitative Case Study Methodology : Study Design and Implementation for Novice Researchers*. 13(4), 544-559.
- Bowe, G. A. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. doi:10.3316/qrj0902027
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrated Framework for Collaborative Governance An Integrative Framework for Collaborative Governance*. October, 31. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hapsari, A. A., & Rahman, A. Z. 2024. *Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) dari Tahun 2018-2023*. 1-17.
- Hasanah, H. (2016). *Teknik-teknik observasi (Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*. *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Juniyanto. 2022. Kolaborasi Antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 45-64. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.5>

- Latifah, H., Nurcahyanto, H., & Aufarul, M. 2024. *Analisis Proses Collaborative Governance dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang*. 1-17.
- Nasir, M. 2023. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023*. 1(2), 22-33.
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. 2024. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 10(September), 826-833.
- Parameswari, W. 2024. Efektivitas Aplikasi Sistem Peringatan Dini dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Kota Jakarta. *Universitas Diponegoro*, 1-23.
- Pratomo, A. J. 2008. *Analisis Kerentanan Banjir Di Daerah Aliran Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis*. Skripsi, 1-24. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., & Basit, M. 2022. *Implementation of Collaborative Governance in Flood Management in the Greater Bandung Area*. 311-322.
- Sanahan, M. G. 2024. *Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. 1-15.
- Santosa, R. (2014). *Metodologi penelitian linguistik/pragmatik*. *Prosiding Prasasti: Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra dan Linguistik)*, 21-32. Program Studi S3 Linguistik, PPs Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/pras.v0i0.432>
- Seftiyana, Y., & Alwi. 2024. De-Coupling Games: Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal* , 4(2), 227-238.
- Sigit, A., & Koyama, M. 2023. *Flood Risk Assessment Focusing on Exposed Social Characteristics in Central Java , Indonesia*.
- Sihaloho, N. T. P. 2022. Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, B., Muradi, & Yuningsih, N. Y. 2024. *Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi*. 6(4), 845-858.
- Widiyarta, A. 2024. *Optimizing Enhancing Cooperative Governance to Reduce Flood Disasters in Bojonegoro Regency : Qualitative Approach and Cooperation Scheme*. 9(4), 775-792.

Dokumen Pemerintah

https://drive.google.com/drive/folders/1UhKAyOhDYG81G4bqP2X4_FpjnT7BBY3J?hl=id